



**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN  
WILAYAH OLEH CHINA DI PERAIRAN KEPULAUAN NATUNA  
MELALUI PELAKSANAAN LATIHAN PUNCAK ANGKASA YUDHA TNI  
AU TAHUN 2016**

**TESIS**

**WIDA SANDITYA KUSUMA**

**120160106032**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN  
PROGRAM STUDI DIPLOMASI PERTAHANAN**

**BOGOR**

**MARET 2019**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bogor, Maret 2019

Wida Sanditya Kusuma

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wida Sanditya Kusuma

NPM : 120160106032

Program Studi : Diplomasia Pertahanan

Fakultas : Strategi Pertahanan

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya berjudul:**

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN  
WILAYAH OLEH CHINA DI PERAIRAN KEPULAUAN NATUNA MELALUI  
PELAKSANAAN LATIHAN PUNCAK ANGKASA YUDHA TNI AUTAHUN  
2016

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Maret 2019

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyanggah gelar Magister dalam bidang ilmu pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tidak mudah bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Letnan Jenderal Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP. selaku Rektor Universitas Pertahanan, Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. I Wayan Midhio, M.Phil selaku Rektor ke-4 Universitas Pertahanan dan Mayor Jenderal Dr. Yoedhi Swastanto, M.B.A. selaku Rektor ke-5 beserta para Wakil Rektor yang telah membimbing selama masa perkuliahan dan penulisan tesis;
2. Letnan Kolonel Sus Dr. H.M. Halkis, M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersabar dan mendedikasikan waktu untuk membimbing saya dalam penulisan tesis ini;
3. Prof. Purnomo Yusgiantoro, Ph.D., MA. M.Sc. selaku dosen pembimbing II yang telah bersabar dan mendedikasikan waktu untuk membimbing saya dalam penulisan tesis ini;
4. Brigadir Jenderal Dr. Rer. Pol. Rodon Pedrason, M.A, Kolonel Caj Dr. Surryanto Djoko Waluyo, M.H., M.M, dan Kolonel Arh. Dr. Jonni Mahroza, S.IP., M.Sc selaku Sesprodi Diplomasi Pertahanan yang bergantian membimbing dan mendukung saya selama melaksanakan proses belajar di prodi Diplomasi Pertahanan dan dalam menulis tesis;
5. Mayor Jenderal TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto, M.B.A., Kolonel Pas Dr. Drs. Marsono, M.Si., Aris Arif Mundayat, Ph.D., Kolonel Caj. Dr. Surryanto D.W., M.H., M.M., Dr. Poppy Setya Wati, S.Sos., M.Si. selaku dewan penguji proposal dan tesis saya yang telah memberi masukan yang sangat membangun dan membuat tesis ini lebih baik;

6. Letnan Kolonel Nav Sonni Benny Simanjuntak, M.Si.Han., Kolonel Oktaheroe Rasmi, Sahono Budianto, S.St.Pi., M.Si., Muhammad Arif, S.Sos., M.A. selaku narasumber yang telah bersedia memberikan informasi yang digunakan sebagai data utama tesis ini,
7. Papa H. David Pujakusuma, S.H., Mama Sitti Halimah Saleh, Adik Tifany Kusuma, S.E., Ak., keluarga saya tercinta yang selalu memberi semangat moral dan material dalam menulis tesis ini;
8. Keluarga besar (Alm.) H. Usman Maun yang telah memberi semangat dan dukungan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini;
9. Sahabat-sahabat terdekat saya, baik dari CPS, CKK, TWITTWARCH, & SPANSA, yang tidak mungkin namanya saya sebutkan satu per satu di sini, yang memberi dukungan moral untuk tetap semangat menyelesaikan tesis;
10. Teman-teman sekelas tercinta dan terhebat di Diplomasi Pertahanan Cohort 3 yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang selalu memberi semangat dan hiburan selama masa belajar dan penulisan tesis;
11. Seluruh mahasiswa/i Universitas Pertahanan Cohort 8

Kepada pihak-pihak yang tidak tersebut, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas bantuannya. Semoga ALLAH SWT membalas semua kebaikan dan bantuan yang diberikan. Akhir kata, saya persembahkan tesis ini dengan harapan dapat bermanfaat bagi pendidikan Indonesia.

Bogor, Maret 2019

Wida Sanditya Kusuma

## ABSTRAK

Nama : Wida Sanditya Kusuma  
Program Studi : Diplomasi Pertahanan  
Judul Tesis : Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Pelanggaran Wilayah oleh China di Perairan Kepulauan Natuna Melalui Pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU Tahun 2016

Pasca insiden penangkapan kapal pencuri ikan nelayan China di perairan Kepulauan Natuna, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyampaikan pesan bahwa perairan Natuna adalah milik Indonesia yang sah dan berdaulat. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan di Natuna pasca insiden tersebut adalah pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha yang diselenggarakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Latihan Puncak Angkasa Yudha adalah latihan rutin dan tertinggi yang dimiliki oleh TNI AU. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus, tesis ini akan mengkaji tentang peran dan bentuk Diplomasi Pertahanan yang terkandung dalam pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha dalam rangka turut menciptakan pertahanan dan keamanan di kawasan perairan Natuna. Teori yang dipakai dalam tesis ini ialah teori kekuatan udara, teori deterensi non-nuklir, dan konsep diplomasi pertahanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Latihan Puncak Angkasa Yudha memiliki peran sebagai diplomasi pertahanan Indonesia dalam menjaga pertahanan dan keamanan perairan Natuna, serta adanya *deterrence effect* atau daya gentar yang berbentuk pengurangan angka pelanggaran batas wilayah hukum oleh China di wilayah tersebut sebagai bukti peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan peningkatan kepercayaan (*confidence building measures/CBMs*) sekaligus meningkatkan hubungan harmonis dengan negara China yang sempat tegang akibat insiden tersebut.

Kata kunci: China, *deterrence effect*, Diplomasi Pertahanan, Latihan Puncak Angkasa Yudha, Natuna

## **ABSTRACT**

*Name : Wida Sanditya Kusuma  
Major : Defense Diplomacy  
Thesis Title : Indonesia's Defence Diplomacy on Tackling Border-Trespassing Issues with China at the Natuna Island waters through the Air Force's Angkasa Yudha Exercise in 2016*

*After the incidents of Chinese illegal fishing boat arrests in the Natuna Islands waters, various attempts were made by the Indonesian government to convey the message that Natuna waters' sovereignty is owned legitimately by Indonesia. One of the activities carried out in Natuna after the incident was the Grand Exercise Angkasa Yudha which was organized by the Indonesian Air Force. Angkasa Yudha Exercise is the annual exercise and the highest form of exercise of Indonesian Air Force. This study uses qualitative research method and study case approach that will examine the role and forms of defense diplomacy contained in the exhibition of Angkasa Yudha Exercise. Theories used in this thesis are air power theory, deterrence theory (non-nuclear deterrence), and defense diplomacy concept. From this study, it could be concluded that Angkasa Yudha Exercise has a role as Indonesia's defense diplomacy in maintaining the defense and security of Natuna waters in terms of capacity building and confidence building measures (CBMs), also it gives deterrence effect in the form of reducing the number of Chinese's violations in the area, this effort also aims to increase harmonious relations with the once-tensed relation with China after the incident.*

*Keywords: Angkasa Yudha exercise, defense diplomacy, deterrent effect, China, Natuna*

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Singkatan .....	xiv
Daftar Istilah Asing.....	xv
BAB 1.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.4.1 Manfaat Akademis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis .....	11
1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Umum Penelitian.....	11
1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	11
1.5.2 Gambaran Umum Desain Penelitian .....	11
BAB 2.....	13
2.1 Tinjauan Pustaka .....	13
2.1.1 Teori Deterensi (Deterrence) dan Konsep Deterensi Non- Nuklir ( <i>Non-Nuclear Deterrence</i> ) .....	13
2.1.2 Teori Kekuatan Udara ( <i>Air Power</i> ) sebagai Diplomasi ( <i>Air Diplomacy</i> ) dan Strategi Penangkalan ( <i>Deterrence Strategy</i> ) .....	18
2.1.1 Konsep Diplomasi Pertahanan ( <i>Defence Diplomacy</i> ).....	22
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Kerangka Pemikiran .....	32
BAB 3.....	33

3.1	Desain Penelitian .....	33
3.2	Sumber Data, Subjek, dan Objek Penelitian .....	34
3.2.1	Sumber Data .....	34
3.2.2	Subjek Penelitian.....	35
3.2.3	Objek Penelitian .....	35
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.4	Teknik Analisis Data .....	36
3.5	Prosedur Penelitian .....	38
3.5.1	Instrumen Penelitian.....	38
3.5.2	Data Primer .....	38
3.5.3	Data Sekunder .....	39
3.5.4	Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data .....	39
3.6	Waktu dan Lokus Penelitian .....	42
BAB 4	.....	43
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	43
4.1.1	Latihan Puncak Angkatan Udara TNI AU.....	43
4.1.2	Kepulauan Natuna dan Situasi Perairan di Sekitarnya .....	51
4.2	Analisis Data dan Interpretasi Hasil .....	53
4.2.1	Peran Latihan Puncak Angkatan Udara sebagai Instrumen Diplomasi Pertahanan Indonesia di Kepulauan Natuna .....	53
4.2.2	Bentuk <i>deterrent effect</i> Latihan Puncak Angkatan Udara TNI AU terhadap Pelanggaran Wilayah oleh China di Perairan Kepulauan Natuna 62	
4.3	Pembahasan.....	70
4.3.1	Pelaksanaan Angkatan Udara di Kepulauan Natuna sebagai Bentuk Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Pelanggaran Wilayah oleh China .....	70
4.3.2	Bentuk <i>deterrence effect</i> pasca pelaksanaan Latihan Angkatan Udha terhadap Pelanggaran Wilayah oleh China .....	73
BAB 5	.....	77
5.1	Simpulan.....	77
5.2	Saran .....	78
5.2.1	Saran Teoritis .....	78

5.2.2	Saran Praktis .....	78
	Daftar Pustaka .....	80

## Daftar Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	31
Gambar 3.1 Bagan <i>Interactive Model of Analysis</i> .....	36
Gambar 4.1 Presiden bersama Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf AU Agus Supriatna meninjau pesawat tempur yang akan dipakai pada Latihan Puncak Angkasa Yudha 2016.....	42
Gambar 4.2 Pilot mengoperasikan helikopter NAS 332 Skadron 6 guna mengevakuasi seorang pilot yang pesawatnya tertembak dalam puncak Latihan Tempur Angkasa Yudha 2016 di Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (6/10/2016) .....	44
Gambar 4.3 Peta Lokasi Kepulauan Natuna.....	49
Gambar 4.4 Peta Konflik Laut China Selatan dan Negara-Negara yang Bersengketa .....	52
Gambar 4.5 Grafik sumber daya minyak dunia yang belum dieksplorasi	54
Gambar 4.6 Grafik sumber daya gas alam dunia yang belum dieksplorasi .....	55
Gambar 4.7 Grafik Anggaran Pertahanan China pada tahun 2005-2015 .....	62
Gambar 4.8 Grafik Anggaran Pertahanan Indonesia pada tahun 2009-2020 .....	63
Gambar 4.9 Pembangunan kekuatan militer di wilayah Kepulauan Natuna .....	76

## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Insiden penangkapan kapal penangkap ikan ilegal yang berasal dari China oleh pihak yang berwenang.....	4
Tabel 2.1 Aktivitas Diplomasi Pertahanan.....	23-24
Tabel 2.2 Tipe-tipe Kekuatan Negara berdasarkan Gregory Winger.....	25
Tabel 2.3 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Tesis.....	29
Tabel 4.1 Pelibatan dan Dislokasi Pesawat terkait Pelaksanaan Angkasa Yudha 2016.....	47
Tabel 4.2 Eksplorasi dan Produksi di Laut China Selatan .....	57
Tabel 4.3 Data Negara dan Jumlah Penangkapan Ikan secara Ilegal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2014-2018.....	60

## Daftar Singkatan

ASEAN	<i>Association of South East Asian Nations</i>
Bakamla	Badan Keamanan Laut
BNPP	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
BTU	Bantuan Tembakan Udara
CAP	<i>Combat Air Patrol</i>
CBM	<i>Confidence Building Measures</i>
Dukud	Operasi Dukungan Udara
GMF	<i>Global Maritime Fulcrum</i>
HAHO	<i>High Altitude, High Opening</i>
IUUF	<i>Illegal, Unregulated, Unreported Fishing</i>
KASAD	Kepala Staf TNI AD
KASAL	Kepala Staf TNI AL
KASAU	Kepala Staf TNI AU
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kotama	Komando Utama
KRI	Kapal Perang Indonesia
Lanud	Pangkalan Udara
MEF	<i>Minimum Essential Forces</i>
OLUO	Operasi Lawan Udara Ofensif
OMP	Operasi Militer Perang
OMSP	Operasi Militer Selain Perang
OSUS	Operasi Serangan Udara Strategis
Pol Air	Polisi Air
PTTA	Pesawat Terbang Tanpa Awak
SAR	<i>Search and Rescue</i>
SUL	Serangan Udara Langsung
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TNI AD	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI AU	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
UN	<i>United Nations</i>
UNCLOS	<i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
USGS	<i>United States Geological Survey</i>
ZEE	Zona Ekonomi Eksklusif

## Daftar Istilah Asing

<i>Coast Guard</i>		Kapal Penjaga Pantai
<i>Capacity Building</i>		Pembangunan Kapabilitas
<i>Combat Air Patrol</i>		Patroli Tempur Udara
<i>Combat Capability</i>		Peningkatan Daya Tempur
<i>Composite Strike</i>		Serangan Gabungan
<i>Confidence Building Measures</i>		Saling Percaya
<i>Defense Industries</i>		Industri Pertahanan
<i>Deterrence</i>		Efek Penggentar/Daya Tangkal
<i>Dog fight</i>		Pertempuran di Udara
<i>Global Maritime Fulcrum</i>		Poros Maritim Dunia
<i>High Altitude, High Opening</i>		Ketinggian dan Pembukaan
<i>Minimum Essential Forces</i>		Pembangunan Kekuatan Minimal
<i>Nine-Dashed Lines</i>		Sembilan Garis Putus-Putus
<i>Search and Rescue</i>		<i>Cari dan Selamatkan</i>
<i>Shock Therapy</i>		Elemen kejutan
<i>Social Contract</i>		Kontrak Sosial
<i>Stakeholders</i>		Pihak terkait
<i>State Presence</i>		Kehadiran Negara
<i>Static Show</i>		Latihan Pesawat
<i>Traditional Fishing Ground</i>		Wilayah Melaut Tradisional

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hari Kamis, 23 Juni 2016, menjadi salah satu hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada hari tersebut, Presiden ke-7 Indonesia, Ir. Joko Widodo, memimpin rapat terbatas yang untuk pertama kalinya dilakukan di atas Kapal Perang Indonesia (KRI) Imam Bonjol 383. Hal ini terjadi setelah peristiwa penangkapan kapal ikan berbendera China di Laut Natuna pada 17 Juni 2016. Kapal ikan Quiongdanzhou 19038 terlihat oleh tim patroli TNI Angkatan Laut sedang menebar jala (Kuwado, 2016). Dilansir dari Kompas.com, menurut Laksmana Muda TNI A. Taufiq R. selaku Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat, para nelayan tersebut beralasan bahwa daerah tersebut adalah daerah melaut tradisionalnya (*traditional fishing ground*). Namun pada kenyataannya, sesuai dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, daerah tersebut termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna yaitu sejauh 200 mil. Hal ini dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan juga sumber daya alam Indonesia.

Presiden Jokowi pun berangkat dari Pangkal Udara TNI AU Halim Perdanakusuma dan mendarat di Pangkalan Udara TNI AU Ranai, Kepulauan Natuna. Tepat setelahnya, Presiden Jokowi berangkat menuju dermaga Penagi untuk naik KRI Imam Bonjol 383 yang sedang patroli di perairan Natuna. Rapat terbatas ini diikuti oleh para Menteri kabinet kerja, antara lain Menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan Luhut B. Pandjaitan, Menteri luar negeri Retno Marsudi, Sekretaris kabinet Pramono Anung, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), beserta sejumlah pejabat lainnya. Seperti

yang tertera pada situs resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, tema utama agenda rapat yang direncanakan oleh Presiden Jokowi dan para Menteri yaitu Pengembangan Potensi Ekonomi Kepulauan Natuna. (Kunjungi Natuna Presiden Jokowi Akan Pimpin Rapat Terbatas di Atas KRI Imam Bonjol, 2016) Dilansir oleh situs berita BBC Indonesia juga, tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana menyebut bahwa rapat terbatas akan membahas sejumlah hal penting yang “berkaitan dengan perairan Natuna yang posisinya berbatasan langsung dengan Laut China Selatan”. (Tiba di Natuna, Jokowi Gelar Rapat di KRI yang Tembak Kapal Cina, 2016) Sekretaris Kabinet, seperti yang dilansir oleh Kompas pada 23 Juni 2016, juga menegaskan bahwa ada pesan kuat yang disampaikan dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna dan menggelar rapat terbatas di KRI Imam Bonjol 383 tersebut. “Natuna adalah wilayah NKRI. Itu sudah final. Maka dengan itu, sebagai kepala pemerintahan dan negara, Pak Jokowi ingin memastikan Natuna bagian dari kedaulatan NKRI.” (Kuwado, 2016)

KRI Imam Bonjol 383 sendiri merupakan kapal perang yang pada pekan sebelumnya menembak kapal nelayan China di perairan Natuna, wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Peristiwa penangkapan tersebut merupakan yang ketiga kalinya setelah terjadi pada Maret dan akhir Mei pada tahun yang sama. Kejadian penembakan bermula ketika pada 19 Maret 2016, ketika KM Kway Fey 10078 tertangkap di perairan Natuna diduga menangkap ikan secara ilegal. Proses penangkapannya pun seolah dihalang-halangi oleh kapal penjaga pantai China (*Chinese coast guard naval ships*). Situs berita BBC melansir bahwa kapal penjaga pantai tersebut sengaja menabrak kapal pencuri ikan itu, yang menurut Menteri Susi, “agar rusak sehingga tidak dapat ditarik”. Kapal Pengawas Hiu 11 milik Indonesia sempat melepaskan tembakan peringatan, bahkan sebanyak tiga personel kapal pengawas juga sempat melompat ke dalam kapal ikan tersebut untuk mengawal. Namun sayangnya, kapal penjaga pantai Cina muncul dan menabrak kapal yang sudah menjadi target operasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut. (Penangkapan

Kapal Ikan Asing Ilegal Cina di Natuna 'digagalkan', 2016) Pemerintah Tiongkok, menurut Menteri Susi, tidak berkenan kapalnya ditenggelamkan. Tidak kurang dari 4 bulan kemudian, KRI Imam Bonjol 383 menangkap kapal ikan Quiongdanzhou 19038 yang terdiri dari 7 awak kapal di Perairan Natuna. Laksmana Muda TNI A. Taufiq R. menyampaikan bahwa KRI Imam Bonjol pun melaksanakan Peran Tempur Bahaya Umum yang kemudian dilanjutkan Peran Pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap KIA Quiongdanzhou 19038 berbendera China yang terdeteksi sedang menebar jala. Karena peringatan dari Indonesia tidak diindahkan oleh kapal penangkap ikan tersebut, KRI Imam Bonjol 383 pun akhirnya memberikan tembakan peringatan ke udara dan satu tembakan lainnya ke arah haluan kapal Quiongdanzhou.

Ketika akhirnya KRI Imam Bonjol berhasil mengawal kapal pencuri ikan itu ke pangkalan TNI AL, kapal *Coast Guard* China 3303 meminta agar kapal Quiongdanzhou dilepaskan. Namun tentu saja permintaan ini tidak digubris oleh pihak KRI Imam Bonjol 383. Namun, ternyata kapal *Coast Guard* China tetap membayangi tanpa tindakan berarti. Mereka kembali meminta agar kapal Quiongdanzhou untuk dilepaskan. Namun, tidak direspons oleh KRI Imam Bonjol. Kapal *Coast Guard* China baru menjauh dari konvoi ketika sudah mendekati daerah perairan teritorial Indonesia.

Tabel 1.1 – Insiden penangkapan kapal penangkap ikan ilegal yang berasal dari China oleh pihak yang berwenang

Tanggal	Kapal yang ditangkap	Ditangkap oleh	Koordinat	Status
15 Mei 2010	Tidak teridentifikasi	Hiu-04 (KKP)	05 <sup>0</sup> 38"N110 <sup>0</sup> 19"E	Dilepas secara paksa
22 Juni 2010	Tidak teridentifikasi	Hiu-05 (KKP)	05 <sup>0</sup> 00"N109 <sup>0</sup> 00"E	Dilepas secara paksa
26 Maret 2013	Guibei Yu 58081	Hiu-001 (KKP)	04 <sup>0</sup> 59"N109 <sup>0</sup> 57"E	Dilepas secara paksa
19 Maret 2016	Kway Fey 10078	Hiu-11 (KKP)	05 <sup>0</sup> 05"N109 <sup>0</sup> 07"E	Dilepas secara paksa, awak kapal ditahan
20 Maret 2016	Guibei Yu 17088	Hiu-001 (KKP)	05 <sup>0</sup> 07"N109 <sup>0</sup> 11"E	Dilepas secara paksa
28 Mei 2016	Guibei Yu 27088	KRI OSA-354 (TNI AL)	05 <sup>0</sup> 16"N110 <sup>0</sup> 14"E	Ditahan
16 Juni 2016	Quiongdanzhou 19038	KRI IBL-383 (TNI AL)	06 <sup>0</sup> 48"N109 <sup>0</sup> 05"E	Ditahan

(Sumber: The Habibie Center – *Indonesia, South China Sea and the Law of the Sea*)

Berulangnya kejadian penangkapan kapal ilegal dari China ini menunjukkan bahwa dengan penangkapan yang sebelumnya, para nelayan China tidak juga jera untuk melakukannya. Pun dengan reaksi pemerintahnya yang seolah-olah melindungi dengan cara menemani/menyokong kapal nelayan mereka dengan kapal penjaga pantai (*coast guards*). Pemerintah China tampak tidak terima dengan penangkapan dan peledakan kapal nelayannya yang sudah melanggar kedaulatan Indonesia dengan melakukan tindakan penangkapan ikan ilegal. Padahal hal ini sudah menjadi kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak Menteri Susi menjabat pada tahun 2014. Kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan diatur dalam Undang-Undang (UU) no. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Di dalam UU No.45 tahun 2009 pasal 65 ayat (4) tertera bahwa, penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggalan kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. (Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan) Semenjak tahun 2014, kebijakan terobosan Menteri Susi ini memang menjadi momok tersendiri bagi para penangkap ikan ilegal yang biasa beroperasi di perairan Indonesia. Namun, tampaknya, meskipun ada kebijakan yang bersifat menangkal (*deterrence*) ini, nelayan dari negara China khususnya tidak gentar sama sekali, sehingga masih berani untuk melaksanakan pencurian ikan di wilayah Kepulauan Natuna. Bahkan, pihak pemerintah China pun berdalih dengan mengatakan bahwa wilayah perairan Natuna masih termasuk ke dalam wilayah kebiasaan melaut tradisional mereka (*traditional fishing ground*), padahal jelas-jelas wilayah perairan Natuna sejauh 200 mil dari daratan adalah wilayah ZEE Indonesia, yang berarti wilayah kedaulatan sah Indonesia. Hal ini juga sebenarnya bagian dari ambisi China untuk mengklaim perairan di sekitar wilayah Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatannya yang dirangkum dalam *Nine Dash Lines* atau Sembilan Garis Putus-putus. Meskipun Indonesia tidak termasuk sebagai negara non-klaiman atas sengketa di Laut China Selatan, tentu saja Indonesia tidak bisa tinggal diam ketika wilayah kedaulatannya terancam oleh negara lain.

Tidak lama setelah kasus penangkapan ikan ilegal oleh nelayan China, tepat pada bulan Oktober 2016, Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU dilaksanakan di Kepulauan Natuna. Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU adalah latihan rutin tertinggi TNI AU yang ditujukan untuk mengukur kemampuan dan kekuatan satuan TNI AU secara berjenjang, mulai dari tingkat perseorangan, satuan, antarsatuan, hingga tingkat Komando Utama (Kotama). Bertindak sebagai Direktur Latihan (Dirlat) Angkasa Yudha 2016 yaitu Panglima Komando Operasi TNI AU I, Marsekal Muda TNI Yuyu Sutisna, S.E. Latihan ini meliputi simulasi skenario taktik dan operasi serangan terbaru untuk menghadapi serangan musuh. Di antaranya taktik penyerangan dengan menggunakan paket pesawat tempur, taktik penghadangan pesawat musuh, membungkam pertahanan udara musuh, dan pengeboman musuh dengan semua pesawat tempur. Latihan Puncak Angkasa Yudha ditujukan untuk

meningkatkan daya tempur (*combat capability*) pada operasi udara, baik secara mandiri maupun operasi gabungan. Hal ini sesuai dengan Tugas Pokok TNI AU Pasal 10 UU No.34 Tahun 2014 tentang TNI;

“Angkatan Udara bertugas: a. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan; b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.”

Dilihat dari tugas pokok ini sesungguhnya tidak bersentuhan dengan masalah kelautan. Namun, dalam sistem pertahanan sesungguhnya tidak bisa dipisah-pisahkan, untuk itu penting diteliti bisakah TNI AU terlibat secara mandiri dalam pengamanan laut. Latihan Puncak Angkasa Yudha 2016 melibatkan puluhan jenis pesawat tempur, pesawat angkut, intai, helikopter dan juga pesawat terbang tanpa awak (PTTA). Latihan ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Ibu Iriana Joko Widodo, beserta para menteri kabinet kerja, yaitu Menteri Koordinator politik, hukum, dan keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan para Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU), beserta para pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga bersama tokoh masyarakat setempat. Para pejabat di atas ikut menyaksikan jalannya operasi udara yang diperagakan dalam bentuk Operasi Seragan Udara Strategis (OSUS), Operasi Lawan Udara Ofensif (OLUO) serta Operasi Dukungan Udara (Dukud) berupa Serangan Udara Langsung (SUL) dan Bantuan Tembakan Udara (BTU), SAR tempur serta penerjunan statik. Presiden Joko Widodo juga sebelumnya meninjau *static show* pesawat dan aneka persenjataan udara. Presiden bahkan sempat menjajal duduk di *cockpit* pesawat tempur Sukhoi. Setelahnya, Presiden

juga disematkan wing penerbang kehormatan kelas satu oleh Kepala Staf TNI AU (KASAU) Marsekal TNI Agus Supriatna. (Wibowo, 2016)

Pada awalnya Latihan Puncak Angkasa Yudha 2016 hendak digelar di *Air Weapon Range Building*, Kecamatan Kelapa Kampit, Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung pada 29 September. Namun, terjadi perubahan rencana karena diperintahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk dipindahkan ke pulau Natuna. Dikutip dari situs Belitong Ekspres, Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud HAS Hanandjoeddin, Kapten Sus Andi Bangsawan, dengan seizin Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) HAS Hanandjoeddin Letkol Pnb Anang Heru Setiyono membenarkan berita pemindahan tersebut. (Latihan Angkasa Yuda Geser ke Natuna, 2016) Menurut beliau, selain untuk mendukung agenda nasional “Sail Karimata 2016”, pemindahan latihan Angkasa Yudha ke Natuna juga bertujuan untuk memberikan *shock therapy* kepada sejumlah kepentingan jahat di wilayah Natuna. Kapten Sus Andi Bangsawan mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia ingin menunjukkan kehebatan Tentara Nasional Indonesia kepada para perompak di lautan agar tidak mengganggu nelayan Indonesia yang melintasi wilayah perairan Natuna.

Kepulauan Natuna adalah salah satu pulau terluar Indonesia di bagian utara yang berada di tengah Laut China Selatan dan mengingat lokasinya yang dekat dengan daerah potensi konflik Laut China Selatan, bukan tidak mungkin jika suatu saat konflik Laut China Selatan pecah menjadi perang terbuka antar negara dalam memperebutkan wilayah tersebut, Kepulauan Natuna juga akan terkena imbasnya. Maneuver Latihan Tempur atau Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU yang dilaksanakan pada 6 Oktober 2016 menurut penulis adalah salah satu upaya strategis sebagai *deterrent effect* atau daya tangkal terhadap ancaman konflik dan krisis kedaulatan wilayah daerah terluar terkait dengan ketegangan di Laut China Selatan. Dengan diadakannya latihan tempur yang bahkan disaksikan oleh Presiden, Panglima TNI, Menteri

Polhukam dan Menlu, diharapkan menciptakan daya tangkal yang baik agar Tiongkok sebagai agresor di Laut China Selatan tidak serta-merta mengklaim ZEE perairan Natuna yang bersinggungan sedikit pada *Nine Dash Line*. Penelitian ini akan meninjau bentuk Diplomasi Pertahanan Indonesia pada Latihan Puncak Angkasa Yudha di Kepulauan Natuna terhadap Pelanggaran Wilayah oleh China di wilayah perairan Natuna. Dalam konteks ini, peneliti akan menitikberatkan apakah pasca penyelenggaraan Latihan Puncak Angkasa Yudha di Kepulauan Natuna, pelanggaran-pelanggaran wilayah yang terjadi di perbatasan Kepulauan Natuna berkurang atau tidak sebagai bentuk efektivitas efek daya gentar (*deterrence effect*) yang diberikan Latihan Puncak Angkasa Yudha.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masih maraknya kasus pelanggaran wilayah di perairan Kepulauan Natuna yang berupa kasus pencurian ikan ilegal tidak saja masalah pencurian ikan tapi menyangkut kedaulatan. Fokus penelitian ini adalah eksistensi Latihan Angkasa Yudha TNI AU dalam menjaga kedaulatan udara terkait dengan dengan perairan perbatasan Indonesia di Kepulauan Natuna sebagai pulau terluar masih terancam. Menariknya, sesuai dengan UU 34 Tahun 2014 tentang TNI sesungguhnya TNI AU memiliki tugas pokok hanya menjaga kedaulatan udara, namun data awal menunjukkan memiliki efek dalam menjaga kedaulatan laut secara tidak langsung. Persoalannya, memang secara umum klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dilakukan oleh China juga merupakan suatu ancaman kedaulatan wilayah yang patut diwaspadai. Pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha di Bandara Ranai, Kepulauan Natuna yang terjadi pasca kasus penembakan kapal penangkap ikan di Perairan Natuna tersebut diharapkan sebagai *deterrent effect* atau pemberi daya gentar/tangkal baik kepada pelaku pelanggaran wilayah, seperti penangkap ikan secara ilegal, maupun pihak-pihak lain yang mengancam kedaulatan negara Indonesia di wilayah perbatasan

atau kepulauan terluar Indonesia tersebut. Diharapkan dengan dilaksanakannya Latihan Puncak Angkasa Yudha, diplomasi pertahanan yang diupayakan Indonesia akan berjalan selain dalam bentuk *deterrent effect*, melainkan juga menunjukkan bahwa kehadiran negara (*state presence*) di wilayah terluar dan terdepan Indonesia menjadi salah satu daya penggentar bagi pihak-pihak yang ingin mengancam kedaulatan negara Indonesia.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran Latihan Puncak Angkasa Yudha sebagai Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap pelanggaran wilayah oleh China di perairan Kepulauan Natuna?
- 2) Bagaimana bentuk efek penggentar/daya tangkal (*deterrence effect*) Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU terhadap pelanggaran wilayah oleh China di perairan Kepulauan Natuna?

### **1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian mengenai dampak pelaksanaan Latihan Angkasa Yudha TNI AU terhadap pelanggaran wilayah yang terjadi di kawasan Kepulauan Natuna adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis peran Latihan Puncak Angkasa Yudha sebagai Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap pelanggaran wilayah oleh China di perairan Kepulauan Natuna,
- 2) Menganalisis bentuk-bentuk efek penggentar/daya tangkal (*deterrence effect*) Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU terhadap pelanggaran wilayah oleh China di perairan Kepulauan Natuna.

### **1.4. Signifikansi Penelitian.**

Penelitian ini memiliki signifikansi yang besar dari segi melihat bentuk Diplomasi Pertahanan Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU sebagai pemberi efek penggentar (*deterrent effect*) bagi pelanggaran wilayah oleh China di kawasan Kepulauan Natuna serta sekaligus melihat pelaksanaan operasi tersebut dari aspek Diplomasi Pertahanan. Dengan melihat dampak pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha, kemudian dapat diketahui dampak latihan terhadap pelanggaran wilayah terhadap kawasan serta meninjau latihan dari kacamata Diplomasi Pertahanan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan kajian serta evaluasi kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait (*stakeholders*), terutama dari pihak militer, TNI AU khususnya, dalam memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis melalui penjelasan dampak Latihan Puncak Angkasa Yudha terhadap pelanggaran wilayah di Kepulauan Natuna sesuai dengan perspektif Diplomasi Pertahanan. Latihan Puncak Angkasa Yudha berperan sebagai *deterrent effect* atau efek penggentar sehingga dapat dianggap sebagai instrumen Diplomasi Pertahanan. Penelitian terdahulu belum ada yang mengkaji Latihan Puncak Angkasa Yudha sebagai instrumen Diplomasi Pertahanan. Adapun penelitian terdahulu membahas peningkatan kapabilitas pangkalan udara dan dampaknya sebagai penguatan instrumen diplomasi pertahanan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam bidang keilmuan diplomasi pertahanan, terutama yang mengangkat topik yang serupa.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak terkait dalam mengidentifikasi fungsi Latihan Puncak Angkasa Yudha sebagai instrumen Diplomasi Pertahanan, yaitu sebagai *deterrent effect* – apakah ia berfungsi efektif atau tidak terhadap pelanggaran wilayah di kawasan Kepulauan Natuna. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi saran serta acuan terutama bagi instansi yang terkait, terutama lembaga pemangku kepentingan serta perumus kebijakan pada pelaksanaan di lapangan, seperti Mabes TNI AU, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## **1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Umum Penelitian**

### **1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini merupakan sebuah kajian Diplomasi Pertahanan yang menekankan Latihan Puncak Angkasa Yudha sebagai bentuk Diplomasi Pertahanan, yaitu sebagai pemberi daya gentar (*deterrent effect*) yang berfungsi untuk mengurangi pelanggaran wilayah oleh China di kawasan Kepulauan Natuna. Penelitian ini didesain secara kualitatif dengan sumber data berupa data primer dan sekunder. Peneliti selain menjadi instrumen penelitian, juga langsung mencari data di lapangan dengan merujuk pada pedoman wawancara. Pada penelitian ini, para informan atau orang yang akan diwawancarai sebagai narasumber dipilih berdasarkan kriteria tertentu atau bersifat *purposive* sesuai dengan data yang diperlukan untuk menganalisis masalah penelitian tersebut. Data yang diperoleh di lapangan akan dianalisis dengan menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman.

### **1.5.2 Gambaran Umum Desain Penelitian**

Bab 1 Pendahuluan

Berisi penggambaran mengenai latar belakang, fokus masalah, perumusan masalah, tujuan, signifikansi dan manfaat penelitian, serta ruang lingkup penelitian.

## Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Berisi penggambaran mengenai teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian, yaitu teori kekuatan udara, deterensi non-nuklir, dan konsep diplomasi pertahanan.

## Bab 3 Metode Penelitian

Berisi penggambaran mengenai tipe penelitian, tempat/lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan rencana pengujian keabsahan data.

## Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi penggambaran mengenai hasil penelitian yang di dalamnya terdapat gambaran umum dan pembahasan yang di dalamnya terdapat jawaban atas permasalahan yang diungkap dapat perumusan permasalahan dan sekaligus penjelasan detail.

## Bab 5 Simpulan dan Saran

Berisi mengenai jawaban atas pertanyaan penelitian dan saran yang dikemukakan berdasarkan pada hasil kajian dan pembahasan di bab-bab sebelumnya.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Teori Deterensi (Deterrence) dan Konsep Deterensi Non-Nuklir (Non-Nuclear Deterrence)**

Dikutip dari Onwudiwe et.al. dalam tulisannya '*Deterrence Theory*', teori Deterensi berangkat dari teori klasik dari para pemikir yang memprotes kebijakan hukum yang mendominasi pemikiran orang Eropa tentang kepercayaan spiritual tentang kriminalitas selama ribuan tahun, salah satunya ialah Thomas Hobbes (1588-1678). Hobbes dalam *Leviathan* (1651) menjabarkan bahwa manusia tidak baik, tidak pula buruk. Ia pun berasumsi bahwa manusia adalah makhluk dengan kehendaknya sendiri yang bertarung ketika keinginannya berkonflik. Dalam pandangan Hobbesian adalah lumrah bagi manusia untuk mengejar kepentingan pribadi, seperti keuntungan materi, keamanan individu, dan reputasi sosial, dan bermusuhan tanpa peduli jika mereka menyakiti orang lain dalam perjalanannya. Karena manusia berniat untuk mencapai kepentingan pribadinya, akibatnya konflik dan perlawanan sering terjadi tanpa adanya pemerintahan yang sanggup untuk menjaga keamanan. Masyarakat pun sebenarnya cukup rasional menyadari bahwa sifat alamiahnya yang mementingkan kepentingan pribadi dapat menciptakan kejahatan serta konflik yang tak terelakkan yang diakibatkan oleh pengasingan dan pembuangan. Untuk menghindari ini, masyarakat pun sepakat untuk merelakan egosentrisitas mereka selama yang lain pun melakukan hal yang benar-benar sama. Ini yang disebut kontrak sosial (*social contract*). Untuk menghindari perang, konflik, dan kejahatan, masyarakat masuk dalam kontrak sosial dengan pemerintah sehingga pemerintah akan melindungi mereka dalam kesulitan. Akan tetapi, perang, konflik, serta kejahatan akan tetap dapat terjadi bahkan setelah pemerintah melaksanakan kewajibannya. Hobbes pun berargumen bahwa

di sini dibutuhkan deterensi, hukuman untuk kejahatan yang terjadi yang lebih besar daripada keuntungan yang didapat dari kejahatan itu sendiri. Deterensi adalah alasan para individu dihukum karena telah menyalahi kontrak sosial, ia berfungsi untuk menjaga persetujuan antara pemerintah dan masyarakat.(Onwudiwe, Odo, & Onyeozili, 2005) Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa deterensi sebagai pencegahan agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran hukum, karena adanya hukuman yang diberikan dan hukuman tersebut akan lebih besar intensitasnya daripada hal yang akan didapatkannya dengan pelanggaran hukumnya.

Sedangkan dalam praktik politik antar negara, deterensi memiliki pengertian dan praktek sendiri. Bernard Brodie dalam tulisannya '*Anatomy of Deterrence*' menyatakan bahwa dalam pandangan Amerika, deterensi strategis memiliki prinsip membatasi proporsi yang dapat diterima ketika konflik menjadi tak terelakkan. Hal ini berangkat dari premis bahwa hasil yang diinginkan dari perang semesta tidak akan pernah cukup untuk menggantikan kerugiannya – sehingga perlu untuk dicegah. Konsep deterensi juga mempertimbangkan fakta bahwa Amerika Serikat adalah dan telah lama menjadi kekuatan *status quo* dan perlu untuk dijaga. Menurut Brodie, deterensi nuklir yang dapat diandalkan harus selalu siap sedia, tetapi tidak pernah digunakan.(Brodie, 1959)

Selanjutnya, Michael J. Mazar dalam tulisannya '*Understanding Deterrence*' mengutarakan bahwa deterensi merupakan praktek menakuti atau menahan seseorang – di dalam politik dunia, biasanya suatu negara – dari mengambil keputusan atau aksi yang tidak diinginkan. Dibutuhkan upaya untuk *menghentikan* atau mencegah suatu tindakan, bertolak belakang dengan sebuah konsep yang berhubungan dekat, tetapi berbeda, yaitu pemaksaan atau '*compellence*' yang merupakan upaya untuk *memaksa* aktor untuk melakukan sesuatu.(Mazar, 2018) Ada juga pengertian dari John Mearsheimer yang berpendapat bahwa deterensi merupakan kemampuan untuk menghalangi (*dissuade*) lawan untuk

memulai tindakan agresif karena manfaat dan risiko melakukannya tidak sebanding dengan hasil yang diinginkan. (Mearsheimer, 1983)

Untuk menjelaskan konteks sejarahnya, mengutip dari Richard Rosencrance dalam artikelnya yang berjudul '*Strategic Deterrence Revisited*' menyatakan bahwa deterensi strategis (*strategic deterrence*) telah menjadi doktrin utama militer semenjak pasca era Perang Dunia II. Lingkungan dimana teori tersebut bermula dan diimplementasikan didominasi oleh pertempuran antara kekuatan Barat dan Uni Soviet. Setelah kudeta Cekoslovakia, blokade Berlin dan invasi Korea, tekanan antara blok menjadi semakin besar yang mengakibatkan para pemimpin Barat berpendapat bahwa jika musuh tidak di'cegah' (*deterred*), ia pasti akan menyerang. Senjata nuklir menjadi instrumen utama dari strategi pencegahan (*deterrent strategy*) karena hanya hal tersebut yang menjanjikan ancaman hukuman berat yang dipercaya dibutuhkan untuk tetap menjadi seorang agresor. Aksi pencegahan juga berbeda dengan aksi bertahan. Pencegahan berfungsi untuk menutupi defisiensi (*make up the deficiencies*) dari pertahanan. Hal ini disebabkan oleh keadaan setelah Perang Dunia II, kekuatan darat pihak Barat lebih kecil dibandingkan pihak lawan, yaitu Soviet. Karena mereka tidak sanggup menanggung serangan pihak Soviet sendirian, maka hanya ancaman eskalasi konflik nuklir yang tinggi termasuk serangan-serangan strategis menuju daratan Soviet, yang membuat sebuah serangan sangat tidak mungkin dihindari bagi pihak agresor mana pun yang berusaha menghitungnya secara rasional. Bahkan setelah Soviet mengembangkan bom nuklir dan termo-nuklir, dan kemampuan peluncuran yang mumpuni, ancaman pembalasan yang hebat (*massive retaliation*) masih dipandang sebagai inti, dan sebagai pilihan terakhir yang paling efektif, pencegahan untuk menyerang Eropa atau Amerika. Dari sini dapat disimpulkan bahwa deterensi dalam politik internasional bermula dari Perang Dingin yang merupakan upaya untuk meredam aksi serangan atau agresi dari lawan. (Rosencrance, 1981)

Menurut Rosencrance, Professor William Kaufmann (1954) adalah salah satu orang pertama yang menyadari bahwa pada dasarnya deterensi bermakna mencegah beberapa tipe kontijensi muncul (*preventing certain types of contingencies from arising*). Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk berkomunikasi dengan yang mungkin menjadi pihak antagonis/lawan apa yang akan terjadi kepadanya, apabila ia menciptakan situasi yang dipertanyakan. Ekspektasinya adalah bahwa dengan dihadapkan dengan kemungkinan ini, ia akan menjadi jera (*deterred*) untuk mengambil langkah yang dinilai bertentangan – setidaknya selama alternatif yang tidak dapat ditoleransi lainnya terbuka untuknya. Lawan harus diyakinkan bahwa pihak yang mencegah (*deterred*) memiliki kemampuan untuk bertindak; 'bahwa dalam bertindak ia dapat menimbulkan biaya lebih besar daripada manfaat yang ingin dimenangkan dari pencapaian objektif; dan ia akan benar-benar bertindak seperti yang dispesifikasikan dalam beberapa kemungkinan (*contingencies*).' Kredibilitas dari respon deterensi itu sendiri bergantung dari opini publik. Deterensi dapat menjadi kredibel 'hanya jika bagian penting dari opini publik dalam negeri dan negara-negara sekutu mendukungnya.' Akhirnya kredibilitas bergantung pada biaya: '... harus ada hubungan antara nilai dari objektif yang diinginkan dan biaya yang dibutuhkan dalam pencapaiannya.' (The Requirements of Deterrence, Memorandum No. 27, Center of International Studies, Princeton University, 15 November 1954, p.6-8)

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert McNamara menegaskan kembali perihal yang sama satu dasawarsa kemudian:

'Pilar dari kebijakan strategis kita akan selalu berupa upaya untuk mencegah serangan nuklir yang disengaja terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Kita melakukan ini dengan menjaga kemampuan yang sangat dapat diandalkan untuk menimbulkan kerusakan yang tidak dapat tertangani oleh sebuah agresor ataupun gabungannya pada saat berjalannya pertukaran serangan nuklir strategis, bahkan setelah menerima kejutan serangan pertama. Ini dapat diartikan sebagai kemampuan jaminan menghancurkan (*assured destruction capability*). Penting diketahui bahwa jaminan kehancuran (*assured destruction*) adalah inti dari konsep deterensi secara keseluruhan. Kita harus memiliki kemampuan jaminan

menghancurkan yang sebenarnya, dan kemampuan tersebut haruslah kredibel.'

Rosencrance menyimpulkan bahwa deterensi adalah hasil dari kapabilitas dan kredibilitas. Jika ingin ditingkatkan, salah satu dari tiga kondisi harus ada: (1) kedua elemen harus mencapai level minimum; (2) jika kredibilitas jatuh, kemampuan untuk menghukum lawan harus ditingkatkan; (3) jika kapabilitas yang dapat dipergunakan menurun, kredibilitas harus meningkat.

Meskipun teori deterensi terfokus pada negara-negara yang memiliki persenjataan nuklir, tidak menutup kemungkinan negara-negara tanpa kepemilikan nuklir dapat menerapkan praktek deterensi tersebut. Seperti yang dituangkan oleh Major Wee Eng Peow dari Angkatan Udara Singapura dalam tulisannya '*The Viability of Deterrence Strategies by Non-Nuclear States*', beliau mengambil contoh negaranya sebagai negara yang tidak memiliki nuklir namun masih tetap dapat mempraktekkan deterensi terhadap lawan potensial (*potential adversaries*). Menurut Mayor Wee, dalam konteks deterensi non-nuklir, pihak-pihak yang memiliki kekurangan baik secara geografis atau angka cenderung untuk melakukan upaya yang lebih banyak serta anggaran yang lebih besar untuk membangun kekuatan deterensi yang mumpuni. Contohnya adalah Singapura dan Korea Selatan. Akan tetapi, beliau juga menulis bahwa bertumpu pada kekuatan militer saja tidaklah cukup untuk mencegah agresi, serta mempertahankan kedaulatan negara-negara non-nuklir ini. Deterensi konvensional harus didukung oleh diplomasi, aliansi politik, kerjasama ekonomi untuk menjadi lebih efektif dalam menangkal agresor. (Peow, 2014)

Dalam tesis ini penulis hendak membuktikan bahwa Latihan Puncak Angkasa Yudha berperan sebagai instrumen yang tepat untuk menangkal agresivitas China di wilayah Kepulauan Natuna, baik dalam hal pencurian ikan ilegal dan juga klaim ekspansionisnya. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa untuk negara-negara yang tidak memiliki nuklir sebagai tamengnya, dapat menggunakan kekuatan konvensional militer

dan juga beberapa upaya lain di luar kekuatan militer untuk menangkal (*to deter*) agresivitas lawan potensialnya.

### **2.1.2 Teori Kekuatan Udara (*Air Power*) sebagai Diplomasi (*Air Diplomacy*) dan Strategi Penangkalan(*Deterrence Strategy*)**

Dalam artikel '*Defining Air Power: Part I – Evolution of The Term*' oleh *Pathfinder Air Power Development Centre Bulletin, Australia*, istilah '*air power*' atau kekuatan udara pertama kali digunakan oleh H.G. Wells pada 1908 dalam novelnya *The War in the Air* (Perang di Udara). Meskipun F.T. Jane menggunakan istilah tersebut pada edisi 1909 dari *All The Worlds Air-Ships* (Seluruh Kapal Udara Dunia), penggunaannya menjadi umum hanya pada akhir 1920-an ketika para teoritis kekuatan udara mengartikan definisi *air power* secara luas. Dari para teoritis awal kekuatan udara– Guilio Douhet, Hugh Trenchard dan William Mitchell – Douhet tidak menggunakan istilahnya sama sekali, meskipun beliau adalah yang paling pertama mengajukan komando udara dan teori perang udara. Demikian juga, meskipun ia menerbitkan tiga pamflet tentang kekuatan udara pada 1943, 1945 dan 1946, Trenchard tidak menentukan istilah tersebut. Pada 1925, Billy Mitchell mengartikan kekuatan udara sebagai, 'kemampuan untuk melakukan sesuatu di udara.' Dalam risalah pra-perangnya *Air Power and Armies* (Kekuatan Udara dan Militer), Kepala Angkatan Udara (*Chief Marshall*) dari *Royal Air Force* (RAF) yang pandai berbicara dan bijaksana, John Slessor, memberikan pengertian yang jelas dari kekuatan udara sebagai, 'gabungan dari Angkatan Udara dan semua hal yang secara langsung ataupun tidak langsung bergantung, seperti industri pesawat yang sedang berkembang dan penerbangan sipil, jasa meteorologi yang baik, pasokan bahan bakar yang aman, dan seterusnya.'

Dampak yang sangat hebat dari kekuatan udara dalam penyelenggaraan Perang Dunia II mengangkat pengakuan tentang pentingnya kekuatan udara untuk keamanan nasional. Pengertian pasca perang menunjukkan kesadaran ini. Angkatan Udara Militer Amerika

Serikat mengartikan kekuatan udara sebagai 'kemampuan total dari sebuah negara untuk terbang, beraksi di ruang udara, untuk mengguakan penerbangan yang terkendali.' Karena perkembangan kekuatan udara fokus lebih kepada kemampuan mematakannya, pengertiannya juga cenderung menghilangkan hubungan dengan keamanan nasional yang lebih luas dan penerapan kekuatan udara itu sendiri. Pada tahun 1983, Richard Mason dan Michael Armitage mengartikan kekuatan udara sebagai 'kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan militer dengan atau dari sebuah platform pada dimensi ketiga di atas permukaan bumi.' RAAF (*Royal Australian Air Force*) kemudian mengadopsi pengertian ini dan mengartikan kekuatan udara hingga edisi ketiga doktrin strategisnya, *The Air Power Manual* (Buku Petunjuk Kekuatan Udara), sebagai 'kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan militernya pada dimensi ketiga – termasuk lingkungan luar angkasa – dengan atau dari platform di atas permukaan bumi.' Definisi ini kemudian diterima luas oleh Angkatan Udara dunia Barat (UK, USA) dan non-Barat (India, Malaysia dan Filipina) dan memberikan standar pengertian kekuatan udara.

Ide menggabungkan istilah udara dan ruang angkasa semakin menonjol pada masa selanjutnya, sehingga seiring dengan pembaruan doktrin Angkatan Udara Australia yang tertuang pada *The Fundamentals of Australian Aerospace Power*, bahwa istilah '*Air power*' diganti menjadi '*aerospace power*' atau kekuatan ruang udara. Namun pada perkembangannya, pengertian ini mendapat beberapa pembaruan. Pada tahun 2007, pada edisi kelima dari '*The Air Power Manual*' mengartikan kekuatan udara sebagai 'kemampuan untuk menciptakan atau memungkinkan penciptaan efek oleh atau dari platform dengan menggunakan atmosfer untuk manufer.' Sedangkan pada 2003, USAF (United State Air Force) mendefinisikan kekuatan udara sebagai, 'penerapan sinergitas dari udara, ruang angkasa dan sistem informasi untuk memproteksikan kekuatan militer strategis global.' Ini merupakan peluasan definisi yang mencerminkan keinginan USAF untuk mendominasi tiga domain daripada hanya sekedar pembaruan doktrin

dalam mengartikan kekuatan udara. Persyaratan untuk proyeksi kekuatan global menghalangi penerimaan definisi ini oleh angkatan udara yang lebih kecil.

Walaupun pengertian kekuatan udara oleh Kanada pada tahun 2007, 'komponen kekuatan militer yang diterapkan dalam atau dari lingkungan ruang udara untuk mencapai efek di atas, pada, atau di bawah permukaan bumi', menggunakan istilah ruang udara, dan ia juga merefleksikan persepsi yang berkembang bahwa kekuatan udara menciptakan dampak dari lingkungan udara. Ini dicerminkan pula lebih jauh dalam pengertian oleh RAF yang diterbitkan pada 2009. Dituliskan bahwa kekuatan udara adalah, 'kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan dari udara dan ruang angkasa untuk mempengaruhi sikap masyarakat atau suatu kejadian.' Ini mungkin adalah pengertian yang paling inovatif dari pengertian yang ada yang secara jelas mengutarakan posisi kekuatan udara pada level strategis keamanan nasional. (Defining Air Power: Part I - Evolution of the Term, 2010)

Bagi Angkatan Udara Indonesia sendiri, pengertian dari kekuatan udara itu sendiri, seperti tertuang dalam Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa dalam pasal 16, dimaknai sebagai salah satu kekuatan negara dalam merekayasa dan menggunakan wahana dirgantara untuk kepentingan nasional. Kekuatan udara tersebut dikembangkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa agar setara dengan bangsa lain di dunia. Adapun komponen dari kekuatan udara, seperti tertera dalam pasal selanjutnya, adalah armada penerbangan militer, armada penerbangan sipil, lembaga pendidikan kedirgantaraan, industri dan jasa kedirgantaraan. (Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa, 2012)

Selanjutnya, pada pasal 19 dijelaskan peran dari kekuatan udara itu sendiri. Dituliskan pada doktrin tersebut bahwa peran kekuatan udara pada hakekatnya merupakan aplikasi kemampuan kekuatan udara

sebagai suatu kekuatan militer yang menguraikan tentang penggunaan kekuatan udara sebagai alat yang dimanifestasikan pada kemampuan Angkatan Udara dalam menyelenggarakan penegakan kedaulatan negara dan hukum di udara, mengelola krisis internasional, dan memelihara perdamaian serta sebagai alat penyelenggara dukungan sosial. Seterusnya pada butir c dijelaskan bahwa kekuatan udara berperan sebagai 'alat penyelenggara pencegah krisis nasional, regional, dan internasional' yang dipaparkan ke dalam 6 poin lanjutan:

- 1) Peringatan. Kekuatan udara berperan untuk memberikan peringatan pada saat yang tepat tentang agresi yang mungkin akan dilakukan oleh musuh.
- 2) Isyarat. Kekuatan udara berperan untuk mengirimkan isyarat politik yang jelas melalui berbagai tindakan, termasuk peningkatan kesiapan secara terbuka, pelatihan, atau penerbangan.
- 3) Dukungan. Kekuatan udara berperan untuk memberikan dukungan moral dan fisik kepada kawan, sehingga memperkuat semangat pada saat moral menurun.
- 4) Pertolongan. Kekuatan udara berperan untuk melakukan operasi pertolongan dalam situasi krisis.
- 5) Peningkatan stabilitas. Kekuatan udara berperan untuk menambah kekuatan lain di wilayah yang terancam huru-hara atau konflik regional, sehingga stabilitas keamanan dapat ditingkatkan.
- 6) Penangkalan. Kekuatan udara berperan sebagai kekuatan penangkalan melalui penggelaran alutsista udara.

Pada poin 6 jelas tertera bahwa peran kekuatan udara dalam doktrin TNI AU adalah sebagai upaya 'penangkalan' atau sebagai deterensi. Penulis ingin menunjukkan bahwa Latihan Puncak Angkasa Yudha adalah merupakan salah satu wujud penerapan kekuatan udara TNI AU di wilayah Kepulauan Natuna yang berperan untuk menangkal segala niat negatif dari lawan, maupun juga sebagai alat pencegah konflik. Hal ini akan dibahas lebih mendalam pada bab selanjutnya.

### 2.1.1 Konsep Diplomasi Pertahanan (*Defence Diplomacy*)

Diplomasi Pertahanan adalah sebuah konsep yang dicetuskan oleh Inggris melalui *Strategic Defense Review* tahun 1998 yang bertujuan untuk mengintegrasikan instrumen militer dan diplomatik terkait pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Walaupun menurut banyak pihak istilah Diplomasi Pertahanan bersifat 'oxymoron' alias bertolak belakang karena cara kerja antara konsep Diplomasi dan Pertahanan yang tidak sejalan, namun ada beberapa pengajuan pengertian Diplomasi Pertahanan yang lebih ramah. Prof. Anton DuPlessis dalam artikelnya "*Defence Diplomacy: Conceptual and Practical Dimensions with Specific Reference to South Africa*" menyebutkan bahwa Diplomasi Pertahanan adalah penggunaan angkatan bersenjata pada operasi (militer) selain perang (OMSP), membangun keprofesionalitasan dan kedisiplinan untuk mencapai kepentingan nasional dan tujuan politik luar negeri. (Plessis, 2008)

Selain itu, menurut Rodon Pedraso dalam disertasinya yang berjudul '*ASEAN's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community?*', Diplomasi Pertahanan merupakan seluruh metode dan strategi yang digunakan oleh negara yang mungkin berada dalam posisi berkompetisi satu sama lain, dimana mereka menggunakan sejumlah praktik seperti ekonomi, budaya, kerjasama politik, kerjasama pertahanan dan diplomasi yang ditujukan untuk membangun rasa percaya diri dan meningkatkan rasa saling percaya. Elemen-elemen utama yang mempengaruhi diplomasi pertahanan, terutama dalam studi kasus ASEAN, adalah unsur saling percaya (*mutual trust*), saling menghormati (*mutual respect*) dan transparansi untuk mengurangi ketegangan antar negara (terutama negara-negara di ASEAN). Walaupun hampir seluruh kegiatan yang ASEAN adakan adalah bersifat informal dan tidak mengikat (*unbinding*), hal tersebut dianggap sebagai suatu kemajuan dalam meningkatkan upaya peningkatan kekuatan regional (*confidence building measures*). Jadi dapat disimpulkan bahwa diplomasi pertahanan adalah seluruh kegiatan diplomatik yang berkaitan dengan keamanan nasional

dan kegiatan militer seperti pertukaran aktor pertahanan dalam rangka melakukan pelatihan bersama dengan aktor pertahanan dari negara-negara lain yang bertujuan untuk memperkuat rasa saling percaya (*confidence building measures/CBM*) dan memperkuat stabilitas kawasan.(Pedrason, 2015)

Diplomasi Pertahanan, seperti yang telah dibahas sebelumnya, lebih memfokuskan kegiatan diplomatik yang berkaitan dengan keamanan yang cenderung bersifat tradisional, yang melibatkan aktor-aktor militer, tetapi juga bersifat diplomatis. Adapun contoh-contoh kegiatan Diplomasi Pertahanan adalah pertukaran Atase Pertahanan dan pelaksanaan latihan gabungan (*Joint Exercise/Operation*). Jim Rolfe dalam *CSS Strategic Background Paper* tentang 'Diplomasi Pertahanan Kawasan: Apa Arti dan Batasannya' dijelaskan bahwa sedikitnya ada 9 tujuan yang hendak dicapai Diplomasi Pertahanan baik dalam kerjasama militer ataupun dengan lembaga-lembaga sipil(Rolfe, 2015):

- Pengurangan pertempuran atau ketegangan,
- Memposisikan secara simbolis dengan memberi sinyal kemauan untuk bekerjasama dan mempercayai negara mitra,
- Angkatan bersenjata yang lebih kompeten dengan komitmen untuk menggunakan mekanisme akuntabilitas,
- Transparansi dalam perihal kapasitas dan intensi/niat,
- Pembangunan dan mendorong hubungan baik dengan negara mitra,
- Bertukar persepsi satu sama lain,
- Membangun kepercayaan diri,
- Mendorong melalui pemberian insentif dan penghargaan, dan
- Membangun konstituensi domestik untuk angkatan bersenjata.

Selain itu Cottey & Forster dalam '*Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*', diplomasi pertahanan meliputi beberapa jenis kegiatan, di antaranya:

Tabel 2.1. Aktivitas Diplomasi Pertahanan

Kontak bilateral dan multilateral antara militer dan pejabat sipil senior Kementerian Pertahanan
Penunjukkan atase pertahanan ke luar negeri
Perjanjian kerjasama pertahanan bilateral
Pelatihan personel militer dan pegawai sipil dari Kementerian Pertahanan asing
Penyediaan tenaga ahli dan nasihat dalam kontrol demokratis dari angkatan bersenjata, manajemen pertahanan, dan lingkup teknis militer
Kontak dan pertukaran personel atau unit militer dan kunjungan kapal-kapal
Penempatan personel militer atau sipil di kementerian pertahanan atau angkatan bersenjata negara sahabat
Pengerahan tim untuk latihan
Penyediaan perlengkapan militer dan bantuan material lainnya
Latihan militer secara bilateral maupun multilateral

Sumber: (Cottey & Forster, 2010)

Menurut Makmur Supriyatnodalam bukunya Tentang Ilmu Pertahanan, Diplomasi Pertahanan memiliki 3 komponen, yaitu:

- a. Masukan dari Menteri Pertahanan (*Minister of Defence*) dan Angkatan (*Armed Forces*) dalam hal pengendalian senjata, pelucutan senjata (*disarmament*) dan pembangunan kekuatan (*confidence building measure*) secara umum;
- b. Apa yang disebut dengan aktifitas diplomasi pertahanan “yang diluar jangkauan” (*outreach*). Contohnya adalah keterlibatan militer Inggris bersama dengan pejabat yang ada hubungannya dan politisi yang dipilih negara-negara bekas Uni Soviet (*the Former Soviet Union/FSU*) atau negara-negara Eropa Timur dan Tengah lainnya (*Other Central and Eastern Europe Countries/CEE*) yang tadinya merupakan negara yang tergabung dalam Pakta Warsawa. Maksud dari pernyataan ini adalah diplomasi pertahanannya diarahkan untuk mendorong atau menganjurkan kepada pihak-pihak di negara FSU dan CEE agar di negaranya tercipta sipil menjadi pengelola yang berkaitan dengan pertahanan, pengendalian dan pengawasan secara

demokratis terhadap pembiayaan dalam bidang pertahanan, dan tindakan untuk sedikit mengurangi pandangan yang kurang baik terhadap masalah-masalah keamanan secara umum.

- c. Apa yang disebut dengan kegiatan 'selain' dari kegiatan 'diplomasi pertahanan'. Kegiatan ini termasuk kegiatan 'yang tidak terjangkau' selain dari yang dicontohkan di atas (FSU/CEE). Komponen diplomasi pertahanan ini, antara lain: pengerahan personel; diperbantukan; penasihat militer; menjadi anggota suatu misi tertentu; dan untuk kepentingan tertentu, antara lain dalam tugas kunjungan atau menerima kunjungan dari luar negeri. Kegiatan ini seperti tertulis dalam SDR Inggris tidak hanya berlaku untuk kalangan militer saja tetapi juga kalangan sipil yang bertugas dalam lingkup Departemen Pertahanan. (Supriyatno, 2014)

Menurut Gregory Winger dalam tulisannya *The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy* (2014), bahwa Diplomasi Pertahanan adalah tentang penggunaan instrumen-instrumen pertahanan (personil militer contohnya) di masa damai untuk berbagai kegiatan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Winger menekankan pada penggunaan *soft power* bukan *hard power* untuk menyampaikan maksud dari negara asal.

Tabel 2.2 – Tipe-tipe Kekuatan Negara berdasarkan Gregory Winger

The Types of Power:

Type of Power	Mechanism	Illustration
Hard Power	Coercion	Country B does what Country A wants because Country A would harm B if it does not comply
Economic Power	Incentive	Country B does what Country A wants because Country A will reward Country B for complying
Soft Power	Co-Option	Country B does what Country A wants because B is convinced that what A wants is best.

Sumber: Gregory Winger dalam *The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy* (2014)

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk melengkapi literatur pendukung penelitian serta sebagai pembanding untuk mempertajam analisis. Penulis akan merujuk pada penelitian yang disebutkan di bawah yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat pada tesis ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu dan ulasannya yang menjadi acuan bagi tesis ini adalah sebagai berikut:

### 1. *Air Defense* – Antara Kebutuhan dan Tuntutan oleh Agus Supriatna (2017)

Buku yang ditulis oleh mantan orang tertinggi di Angkatan Udara Indonesia pada tahun 2015-2017 ini membahas tentang konsep '*Air Defense*' untuk membangun pertahanan udara Nasional yang diharapkan akan mampu menguasai dan melindungi wilayah kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia demi terwujudnya kekuatan dan kedaulatan Indonesia. Buku ini membahas tentang dinamika lingkungan strategis yang menjadi tantangan utama bagi Angkatan Udara Indonesia, serta perubahan jaman yang juga menuntut pembaruan sistem pendukung pertahanan Indonesia. Penulis buku mengedepankan penerapan konsep '*Air Defense*' yang berangkar dari teori '*Air Power*' dalam menghadapi tantangan ini. Di dalam buku ini juga dibahas beberapa studi kasus terkait ancaman-ancaman yang pernah dihadapi Angkatan Udara Indonesia beserta sikap yang diambil TNI AU untuk menyelesaikan kasus tersebut. Buku ini juga memberikan contoh tentang penggunaan konsep '*Air Defense*' untuk dipraktekkan oleh Angkatan Udara Indonesia di masa depan.

### 2. Mispersepsi dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Peluang Diplomasi Pertahanan Indonesia oleh Yoedhi Swastanto, Rodon Pedrason, Yandry Kurniawan, dan Muhammad Arif (2017)

Di dalam jurnal ini disampaikan tentang adanya persepsi dan mispersepsi dari negara-negara klaiman di kawasan Laut China Selatan yang membuat potensi konflik terbuka semakin besar. Maka daripada itu, para penulis berpendapat bahwa peran Indonesia yang menolak untuk menjadi klaiman di kawasan tersebut, melainkan sebagai *'honest broker'* dalam konflik tersebut dapat ditingkatkan untuk mencegah konflik berkembang jadi lebih buruk lagi dengan memanfaatkan peluang diplomasi pertahanan Indonesia. Dalam tulisan ini penulis mengemukakan cara/praktek diplomasi pertahanan yang dapat diaplikasikan untuk mencegah konflik Laut China Selatan memburuk dengan menggunakan teori persepsi dan mispersepsi dalam politik internasional dan konsep diplomasi pertahanan.

3. *Indonesia, South China Sea and the Law of the Sea* oleh Rene Pattiradjawane, Muhammad Arif, Mila Octaviani (2017)

Jurnal ini mengangkat tentang upaya Indonesia untuk turut serta aktif dalam meredam konflik di Laut China Selatan. Selain karena untuk menjaga stabilitas kawasan, juga untuk menjaga keutuhan kedaulatan Indonesia karena adanya klaim tumpang-tindih ZEE Kepulauan Natuna. Jurnal ini juga mengangkat formulasi kebijakan luar negeri dan keamanan Indonesia serta perubahan kebijakan dalam negeri terkait konflik Laut China Selatan sesuai dengan teori perumusan kebijakan luar negeri. Di dalam jurnal ini pula dicantumkan data-data pembangunan Kepulauan Natuna sebagai upaya Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan Natuna sebagai salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah rentan konflik Laut China Selatan.

4. *The Natunas: Territorial Integrity in The Forefront of Indonesia-China Relations* oleh Leo Suryadinata dan Mustafa Izzuddin (2017)

Fokus tulisan ini adalah pembahasan tentang sejarah konflik Natuna bermula serta pengaruhnya terhadap hubungan antara Indonesia dan China sebagai salah satu mitra strategis terbesarnya. Di dalam tulisan ini dibahas juga bagaimana reaksi dari kedua negara ketika konflik

Natuna berlangsung. Penulis mempertimbangkan juga isu dan persepsi yang berkembang di dalam negeri Indonesia terhadap China dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pengambilan kebijakan terhadap China.

Dari empat literatur di atas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Persamaannya adalah buku dan penelitian di atas membahas tentang pertahanan udara dan upaya pencegahan konflik di Natuna dan Laut China Selatan secara terpisah. Sedangkan untuk perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah peneliti akan menggabungkan kedua elemen tersebut dengan menjadikan Latihan Puncak Angkasa Yudha sebagai objek penelitian utama. Adapun daftar persamaan dan perbedaan lengkapnya dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

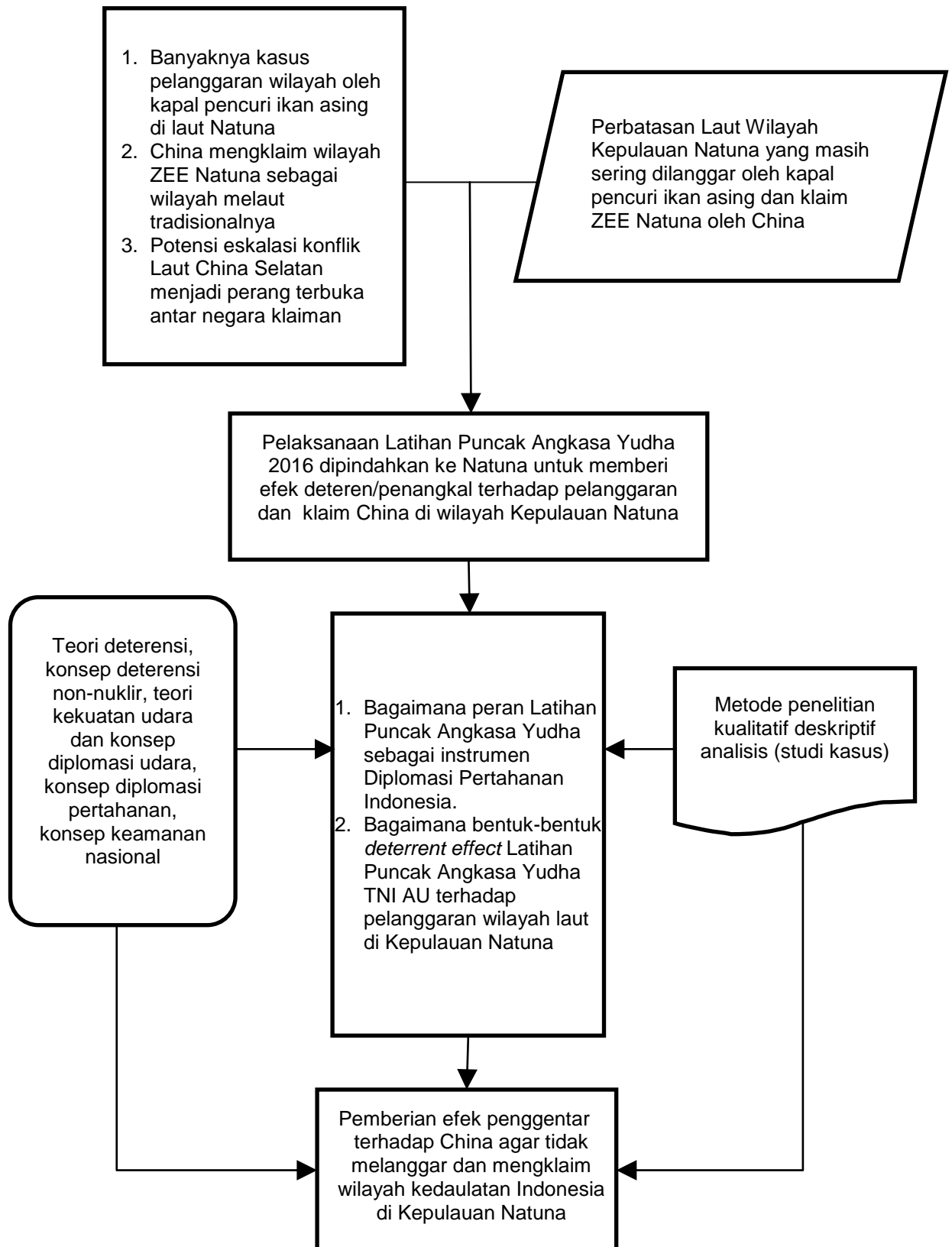
Tabel 2.2. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Tesis

Penulis (tahun rilis)	Agus Supriatna (2017)	Yoedhi Swastanto, Rodon Pedrason, Yandry Kurniawan, Muhammad Arif (2017)	Rene Pattiradjawane, Muhammad Arif, Mila Octaviani (2017)	Leo Suryadinata, Mustafa Izzuddin (2017)	Wida Sanditya Kusuma (2018)
Jenis dan Judul	Buku: <i>Air Defense – Antara Kebutuhan dan Tuntutan</i>	Jurnal: Mispersepsi dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Peluang Diplomasi Pertahanan Indonesia	Jurnal: <i>Indonesia, South China Sea and the Law of the Sea</i>	Jurnal: <i>The Natunas: Territorial Integrity in the Forefront of Indonesia-China Relations</i>	Tesis: Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Pelanggaran Wilayah oleh China di Kepulauan Natuna Melalui Pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU Tahun 2016
Rumusan Masalah	Konsep ' <i>Air Defense</i> ' untuk membangun pertahanan udara Nasional yang mampu menguasai wilayah demi terwujudnya kekuatan dan kedaulatan Indonesia	Analisis persepsi dan mispersepsi negara yang klaiman di kawasan Laut China Selatan yang berpotensi konflik, peluang diplomasi pertahanan Indonesia untuk mencegah konflik	Formulasi kebijakan luar negeri dan keamanan serta perubahan kebijakan dalam negeri terkait konflik Laut China Selatan	Sikap Indonesia terhadap China dalam menghadapi klaim wilayah, Laut China Selatan dan penangkapan ikan ilegal.	Pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha sebagai instrumen Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap pelanggaran wilayah oleh China di wilayah Kepulauan Natuna

		memburuk.			
Ruang Lingkup	Konsep <i>air defense</i> untuk memperkuat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dinamika lingkungan strategis Indonesia serta peluang dan ancamannya untuk membangun pertahanan udara	Konflik Laut China Selatan, Persepsi dan Mispersepsi negara-negara klaiman, aktivitas dan peluang diplomasi pertahanan Indonesia untuk meredam konflik Laut China Selatan	Konflik Laut China Selatan, kebijakan luar dan dalam negeri Indonesia dalam menghadapi konflik LCS, pembangunan di Natuna pasca penerapan kebijakan	Klaim China terhadap wilayah ZEE Natuna, Sikap Indonesia terhadap China yang merupakan salah satu mitra strategis terbesarnya	Kasus pelanggaran wilayah di Kepulauan Natuna oleh China (penangkapan ikan illegal, klaim wilayah ZEE Natuna), Latihan Puncak Angkasa Yudha, tahun 2016
Teori	Teori kekuatan udara ( <i>air power</i> ), konsep <i>air defense</i>	Pendekatan persepsi dan mispersepsi dalam politik International, konsep diplomasi pertahanan	Teori Perumusan Kebijakan Luar Negeri	Pendekatan analisis kritis	Teori deterensi dan konsep deterensi non-nuklir, konsep diplomasi pertahanan, teori <i>air power</i> dan konsep <i>air diplomacy</i>

					<i>for deterrence</i>
Metode	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif

### 2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode atau desain penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Menurut McNabb di dalam bukunya Metode Penelitian untuk Ilmu Politik, istilah penelitian kualitatif dipakai untuk menjelaskan serangkaian teknik pertanyaan non-statistik dan berbagai proses yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang fenomena sosial (McNabb, 2010). Metode penelitian kualitatif pula menurut Creswell bergantung pada data teks dan gambar, memiliki langkah yang unik dalam proses analisis data, dan memiliki berbagai desain (Creswell, 2013). McNabb menyatakan bahwa pemakaian data kualitatif tidak sebatas pendeskripsian tentang sebuah peristiwa dan fenomena, melainkan ia dapat dipakai untuk menciptakan pemaknaan, interpretasi subyektif, dan bahkan untuk analisis kritis. Data kualitatif berupa data yang dikumpulkan sebelum pelaksanaan penelitian ataupun saat melaksanakan penelitian tersebut. Ada pun menurut Miles dan Huberman menyimpulkan bahwa data kualitatif ialah esensi dari masyarakat, benda-benda, serta situasi. Yang kemudian dimaksud sebagai esensi adalah reaksi dan interpretasi yang dihasilkan oleh para peneliti dimana ia melalui berbagai proses seperti analisa dan pemaknaan hingga menjadi suatu kesimpulan tersendiri. (Miles & Huberman, Qualitative Data Analysis, 1994)

Menurut Sutrisno & Hanafie, penelitian kualitatif dilakukan secara induktif (khusus-umum) untuk mendapatkan data yang menyeluruh serta mendalam yang dimulai dengan hal khusus hingga menjadi hal yang *general* atau umum. (Soetrisno & Hanafie, 2007) Sekalipun bersifat induktif dalam Studi Kasus perlu *framework* sebagai acuan dalam pedoman pengumpulan, kondensasi maupun analisis data. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menyorot

peristiwa/fenomena Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU dalam perannya sebagai elemen Diplomasi Pertahanan dalam memberi daya gentar (*deterrent effect*). Dalam menggunakan metode induktif ini diharapkan akan dapat menghasilkan penjelasan yang sistematis, faktual, akurat serta valid tentang bagaimana dampak Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU yang berperan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan dan pelanggaran perbatasan di laut oleh nelayan tradisional selain mempertahankan kedaulatan udara sebagai tugas pokok TNI AU. Kemudian juga memberikan efek gentar di kawasan. Data utama/primer yang akan dikumpulkan dengan penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan yang dituju untuk mendapatkan keterangan lisan yang mendukung atau berkaitan dengan topik penelitian, selain itu kajian literatur baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, media dan elektronik juga menjadi data sekunder untuk menyokong topik penelitian ini.

### **3.2 Sumber Data, Subjek, dan Objek Penelitian**

#### **3.2.1 Sumber Data**

Sumber data yang merupakan unsur inti dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu yang berasal dari hasil wawancara secara langsung dan mendalam kepada informan atau narasumber yang dianggap kompeten membahas isu yang bersangkutan (*in-depth interview*). Berdasarkan hal tersebut yang menjadi narasumber dalam penelitian ini diutamakan adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU serta pandangan ahli terhadap fenomena ini untuk menjelaskan peran Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU sebagai elemen diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan. Sedangkan untuk data sekunder untuk penelitian ini bersumber dari yaitu buku, jurnal, dokumen resmi, rilis media cetak dan elektronik yang relevan.

### 3.2.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian, menurut Arikunto dalam bukunya *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, merupakan orang atau benda maupun dokumen yang memiliki kaitan secara langsung dengan objek yang hendak diteliti. (Arikunto, 2010) Subjek utama dalam penelitian ini adalah orang yang berkaitan langsung dalam pengumpulan data primer atau yang kemudian akan menjadi narasumber pada kegiatan wawancara, dalam hal ini yaitu para pengambil keputusan terutama yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Latihan Angkasa Yudha TNI AU. Adapun daftar narasumber yang diwawancarai untuk penelitian ini adalah:

1. Mabes TNI AU
  - a. Perwira Bantuan Madya (Pabandya) Operasi TNI AU
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
  - a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan/atau Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)
3. Direktorat Kerjasama Internasional (Ditkersin), Kementerian Pertahanan
4. Lembaga pemikir strategis/*think-tank*: The Habibie Center

Melalui narasumber yang menjadi subjek penelitian di atas diharapkan penulis akan mendapatkan data, baik berupa penjelasan komprehensif dan juga data statistik yang nantinya akan diramu menjadi kesimpulan bagi penelitian ini.

### 3.2.3 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan inti dari problematika penelitian (Arikunto, 2010). Ia menjadi sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan dapat dipercaya (Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, 2016). Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian

adalah Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU sebagai instrumen Diplomasi Pertahanan Indonesia di kawasan.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

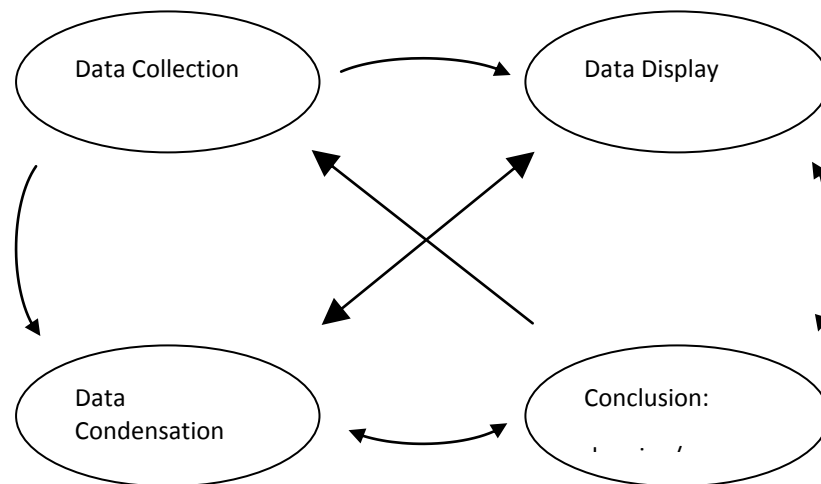
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dan bernilai strategis dalam penelitian karena untuk menghasilkan kesimpulan yang baik, diperlukan teknik pengumpulan data yang baik pula. Menurut Sugiyono, ada tiga langkah dalam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dengan narasumber, dan yang terakhir studi pustaka. Ketiga tahap ini dilakukan untuk memperkuat data penelitian itu sendiri. Observasi dan wawancara langsung dilaksanakan pada pihak-pihak yang terlibat atau pelaku yang berperan langsung dalam pengambilan keputusan atas topik atau masalah terkait.

Dalam metode penelitian kualitatif yang lebih condong bersifat eksplanatif, untuk tahapan wawancara digunakan sistem *purposive sampling* dimana pengambilan sampel narasumber akan ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu dan berdasarkan kriteria dimana sesuai dengan kompetensi yang mumpuni terkait topik penelitian. Menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), 2016), hal ini tidak lain untuk efektifitas penelitian, terutama dalam hal mempersingkat waktu penelitian.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Dalam bukunya, McNabb menuliskan “*All data must be analyzed and interpreted before they have meaning*”, hal ini menunjukkan bahwa setiap data yang dikumpulkan harus dianalisis dan diinterpretasikan sebelum akhirnya dia bermakna. Data berupa gambar serta kata-kata hasil wawancara narasumber maupun hasil kajian pustaka diolah untuk menjadi informasi yang akan dijadikan bahan penelitian. Penelitian ini akan

menggunakan analisis data kualitatif dengan pengolahan data yang akan diubah menjadi informasi tekstual tanpa interpretasi angka atau statistik. Dalam memproses data penelitian yang bersumber dari hasil wawancara, observasi serta kajian literatur, peneliti mengacu pada tiga langkah analisis yang diajukan oleh **Miles, Huberman dan Saldana (2014)**, yaitu:



Gambar 3.1 Bagan *Interactive Model of Analysis*

Sumber: (Miles, Huberman, & Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* 3rd Edition, 2014, hal. 14)

- a. Kondensasi data (*Data condensation*), dimana data akan dipilih, dipusatkan dengan penyederhanaan, pengabstrakan dan pengubahan data mentah yang berasal dari catatan di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data kualitatif berlangsung. Kemudian, tahapan reduksi lanjutan yaitu membuat ringkasan, mengkode menelusur tema, membuat gugusan data, partisi/pemisahan data dan menulis memo. Proses reduksi ini akan terus terjadi hingga laporan penelitian akhir lengkap.
- b. Penyajian data (*Display Data*), yaitu penarikan kesimpulan dari kumpulan informasi tersusun yang membuat peneliti lebih memahami apa yang terjadi serta apa yang harus dilakukan, menganalisis atau Penelitian mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang di dapat dari penyajian data itu sendiri.

Penyajian data dapat berupa pemaparan matriks, grafik, jaringan dan bagan. Keseluruhannya dimaksudkan untuk memudahkan informasi supaya padu dan gampang untuk dipahami.

- c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*), yaitu pencarian pola atau alur sebab-akibat (kausalitas) dari hal yang diteliti. Hal ini juga harus diverifikasi selama penelitian berlangsung.

### **3.5 Prosedur Penelitian**

#### **3.5.1 Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan seluruh alat yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen utama adalah penulis dengan dibantu hasil dari wawancara narasumber. Pedoman wawancara yang akan digunakan disusun sesuai dengan objek penelitian ini yaitu Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU sebagai instrumen Diplomasi Pertahanan Indonesia di kawasan.

#### **3.5.2 Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh penulis langsung dari sumber data, dalam hal ini berupa dokumen-dokumen resmi (*official documents*) dari TNI Angkatan Udara yang menjelaskan Operasi Angkasa Yudha secara rinci, dan juga dapat berupa hasil wawancara dengan narasumber primer dan juga sekunder. Adapun beberapa narasumber dalam penelitian ini adalah Perwira Bantuan Madya (Pabandya) Operasi Markas Besar TNI AU; Kepala Bagian Kerjasama dan Humas, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Kepala Direktorat Kerjasama Internasional (Ditkersin) Kementerian Pertahanan, Peneliti dari *The Habibie Center*.

### 3.5.3 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis selama kegiatan penelitian melalui berbagai sumber tersedia dan terbuka (*open and available to public access*). Sumbernya antara lain berupa buku, jurnal, tesis, laman web, media massa cetak maupun elektronik, serta dokumen resmi dari lembaga terkait.

### 3.5.4 Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data

Pada penelitian kualitatif, data-data temuan dinyatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan baik antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi pada objek penelitian sesungguhnya. Uji validitas data diperlukan untuk menentukan keabsahan data tersebut, yaitu dengan cara *cross-check* data, yaitu mencocokkan data dengan temuan lapangan. Hal ini juga dikenal sebagai teknik Triangulasi data, yang mana menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), 2016) triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Menurut Creswell (2009), teknik keabsahan atau validitas data merupakan cara yang digunakan untuk memeriksa dan menunjukkan akurasi penemuan dalam penelitian yang dilakukan melalui prosedur tertentu, sumber data, dan metode.

Keabsahan atau validitas data dalam penelitian kualitatif meliputi pengujian kredibilitas (*credibility*), generalisasi, reliabilitas (*reliability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*) (Sugiyono, 2010, hal. 268). Sugiyono (2010, hal. 270) menambahkan bahwa terdapat beberapa cara untuk melakukan uji kredibilitas data, di antaranya:

- a. Perpanjangan pengamatan. Dalam hal ini, peneliti turun kembali ke lapangan dan melakukan wawancara baik dengan narasumber sebelumnya maupun narasumber yang baru. Dalam rangka menguji

kredibilitas data penelitian, sebaiknya berfokus pada pengujian data yang telah diperoleh.

- b. Peningkatan ketekunan, yaitu melakukan pengamatan dengan lebih teliti dan dilakukan secara berkesinambungan.
- c. Triangulasi, yaitu pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu yang berbeda.
- d. Analisis kasus negatif. Dalam hal ini, peneliti mencari data yang berbeda atau bertolak belakang dengan data yang telah diperoleh. Jika tidak ada data yang berbeda maupun bertolak belakang dengan data yang telah diperoleh, hal tersebut berarti data yang kita miliki sudah dapat dipercaya.
- e. Menggunakan referensi. Dalam cara ini, dibutuhkan data pendukung untuk membuktikan data yang telah diperoleh oleh peneliti, contohnya hasil wawancara perlu dilengkapi atau didukung dengan rekaman wawancara (transkrip).
- f. *Membercheck*, yaitu proses pengecekan data yang telah didapat peneliti kepada pemberi data atau sumber data. Tujuan dari membercheck adalah untuk mengetahui apakah data yang didapat telah sesuai dengan data yang diberikan oleh pemberi data.

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi dilakukan melalui berbagai sumber data maupun metode. Teknik ini akan dilakukan terhadap sumber data dan informan. Triangulasi sumber data dilakukan dengan metode *cross-check* data yang didapatkan dari sumber data primer dan sekunder. Triangulasi informan dilakukan dengan melakukan *cross-check* data yang diperoleh dari setiap informan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan dan memahami perbedaan atau bias sehingga dapat meningkatkan reliabilitas dan validitas penelitian (Wahyuni, 2012, hal. 40).

Apabila data yang diperoleh dari Informan atau narasumber sebagai data primer serta data yang diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal dan media sesuai dengan penelitian yang

dilakukan, maka data tersebut dianggap valid, sehingga penelitian itu dapat dianggap berhasil. Akan tetapi, apabila data tersebut tidak cocok, diperlukan pengkajian ulang mengenai elemen dan cara yang dilakukan telah sesuai atau belum sesuai prosedur yang ada.

### 3.6 Waktu dan Lokus Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2018 hingga bulan Maret 2019 di beberapa instansi pemerintahan yang terletak di DKI Jakarta, yaitu Markas Besar TNI Angkatan Udara di Cilangkap, Kementerian Pertahanan di Jakarta, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Berikut adalah tabel waktu penelitian yang diajukan oleh penulis sebagai rencana untuk melaksanakan penelitian tesis.

No	Kegiatan	Waktu pelaksanaan penelitian												
		2018										2019		
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Pengajuan Judul dan Penyusunan Proposal	■	■	■										
2.	Observasi Awal				■	■	■	■						
3.	Ujian Proposal								■					
4.	Revisi Ujian Proposal								■					
5.	Penelitian Lapangan								■	■	■	■	■	■
6.	Pengolahan Data & Bimbingan											■	■	■
7.	Penyusunan Hasil penelitian dan draft tesis												■	■
8.	Ujian Pra-Tesis													■
9.	Ujian Tesis													■
10.	Perbaikan Naskah Tesis													■

## **BAB 4**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU**

Latihan puncak Angkasa Yudha TNI AU adalah merupakan latihan rutin yang dilaksanakan oleh TNI AU setiap tahunnya yang merupakan akumulasi dari semua latihan yang telah dilaksanakan oleh satuan-satuan TNI AU. Latihan ini dilaksanakan secara berjenjang dan terus menerus, diawali dari latihan perorangan, satuan, antar satuan, hingga tingkat Komando Utama (Kotama) – yang merupakan salah satu syarat profesionalitas bagi TNI, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa latihan yang dilakukan oleh TNI tidak hanya ditujukan untuk Operasi Militer untuk Perang (OMP) akan tetapi juga Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Seperti yang tertera pada majalah Suara Angkasa edisi Oktober 2016 yang dirilis oleh Dinas Penerangan TNI AU, Latihan Puncak TNI AU tahun 2016, yang diberi sandi Angkasa Yudha, digelar untuk meningkatkan daya tempur (*combat capability*) pada operasi udara, baik secara mandiri maupun operasi gabungan.

Latihan Puncak Angkasa Yudha 2016 digelar di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, pada hari Kamis 6 Oktober 2016 dengan melibatkan puluhan jenis pesawat tempur, pesawat angkut, intai, helikopter dan juga pesawat terbang tanpa awak (PTTA). Selain itu, prajurit-prajurit TNI pun juga dikerahkan sebanyak lebih dari dua ribu personel, serta melibatkan empat Pangkalan TNI AU (Lanud) sebagai pangkalan aju, yaitu Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Supadio Pontianak, Ranai dan Batam. Dikepalai oleh Panglima Komando Operasi TNI AU I (Pangkopsau I) Marsekal Muda (Marsda) TNI Yuyu Sutisna, S.E. (kini menjabat sebagai

Kepala Staf TNI AU) yang bertinjak sebagai Direktur Latihan (Dirlat) Angkasa Yudha 2016.



Gambar 4.1 – Presiden bersama Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf AU Agus Supriatna meninjau pesawat tempur yang akan dipakai pada Latihan Puncak Angkasa Yudha 2016 (Sumber gambar: <https://www.medcom.id/foto/news/GKdXroeK-presiden-tinjau-puncak-latpur-angkasa-yudha-2016>)

Latihan puncak Angkasa Yudha 2016 dihadiri pula oleh Presiden RI Joko Widodo yang didampingi oleh beberapa Menteri kabinet kerja, yaitu Menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, para Kepala Staf Angkatan (KASAD, KASAL, dan KASAU) serta beberapa pejabat daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyaksikan jalannya operasi udara tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meninjau *static show* pesawat dan aneka persenjataan udara. Presiden Joko Widodo bahkan sempat menjajal duduk di *cockpit* pesawat tempur Sukhoi. Setelah itu, presiden disemati wing penerbang kehormatan kelas satu oleh Kepala Staf TNI AU (KASAU) Marsekal TNI Agus Supriatna.

Latihan Puncak Angkasa Yudha 2016 sendiri diperagakan dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Operasi Serangan Udara Strategis (OSUS)

Operasi Serangan Udara Strategis (OSUS) adalah operasi yang dilaksanakan untuk mengamati, mengidentifikasi, menyerang dan menghancurkan sasaran-sasaran bernilai strategis yang merupakan *centre of gravity* guna menetralisasi kemampuan dan motivasi perang musuh dalam rangka perang.

2. Operasi Lawan Udara Ofensif (OLUO)

Operasi Lawan Udara Ofensif (OLUO) adalah operasi yang dilaksanakan untuk menghancurkan ataupun menetralisasi kekuatan udara musuh di permukaan dalam rangka perang guna mendapatkan keunggulan udara di mandala operasi, sehingga operasi darat, laut, dan udara kawan dapat terlaksana tanpa ada gangguan dan ancaman dari kekuatan udara musuh.

3. Operasi Dukungan Udara (Dukud)

Operasi Dukungan Udara (Dukud) adalah operasi yang dilaksanakan untuk mendukung kekuatan darat, laut, udara dan instansi lain yang sedang atau akan melaksanakan operasi dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Operasi dukungan udara juga ditujukan untuk menciptakan keberlangsungan (*sustainability*) perang yang sedang dilaksanakan. Dalam Latihan Angkasa Yudha 2016 operasi Dukud termasuk berupa Serangan Udara Langsung (SUL) dan Bantuan Tembakan Udara (BTU),

4. SAR (*Search and Rescue*) Tempur

SAR (*Search and Rescue*) Tempur adalah tindakan penyelamatan prajurit yang tersandera di medan tempur.

5. Penerjunan statik

Penerjunan statik adalah penerjunan prajurit dari helikopter atau pesawat menuju daerah target operasi.

(Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa, 2012)

Adapun skenario latihan puncak Angkasa Yudha seperti yang dirilis oleh pihak Dinas Penerangan (Dispen) TNI AU melalui majalah rutinnya Suara Angkasa edisi Oktober 2016 adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2 – Pilot mengoperasikan helikopter NAS 332 Skadron 6 guna mengevakuasi seorang pilot yang pesawatnya tertembak dalam puncak Latihan Tempur Angkasa Yudha 2016 di Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (6/10/2016)  
Sumber gambar: <https://www.arah.com/gallery/219/foto-puncak-latihan-tempur-angkasa-yudha-2016.html>

### **Serangan Gabungan (*Composite Strike*)**

Pesisir Pantai Natuna, yang disimulasikan sebagai wilayah yang sudah dikuasai “musuh”, menjadi target serangan pesawat-pesawat tempur TNI AU untuk direbut kembali. Proses perebutan, dilaksanakan melalui sebuah operasi udara, dalam bentuk Operasi Serangan Udara Khusus (OSUS) oleh pesawat-pesawat tempur T-50i *Golden Eagle* dan Operasi Lawan Udara Ofensif (OLUO) oleh pesawat-pesawat tempur Sukhoi Su-27/30, F-16 *Fighting Falcon* dan Hawk 100/200.

Babakan operasi udara diawali dengan pengintaian udara strategis oleh pesawat Boeing 737. Operasi ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi kekuatan “musuh”. Setelah itu dilakukan penerjunan pasukan pengendali tempur (Dalpur) oleh personel Bravo Paskhas. Pasukan elit Paskhas ini diterjunkan pada malam hari, dengan teknik terjun HAHO (*high altitude, high opening*) agar tidak diketahui “musuh”. Pasukan Dalpur mengemban misi pengendali pertempuran, khususnya dalam memberikan

informasi kepada para penerbang tempur tentang situasi dan kondisi cuaca, medan dan kondisi musuh.

Selanjutnya dilakukan simulasi pertempuran di udara (*dog fight*) antara pesawat kawan yang diperankan Sukhoi Su-27/30 (sebagai *sweeper*) yang bertugas menyapu kekuatan udara lawan dengan pesawat musuh yang diperankan pesawat F-16 *Fighting Falcon* yang bertugas mengganggu pesawat penyerang kawan (*striker*). Simulasi OSUS menjadi adegan berikutnya, dimana empat pesawat T-50i *Golden Eagle* melaksanakan penyerangan dari udara terhadap target-target “musuh” di permukaan.

Dalam melaksanakan misi OSUS, pesawat tempur T-50i *Golden Eagle* membawa puluhan bom MK-82. Pesawat-pesawat yang ber-*home base* di Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi Madiun ini menggempur basis-basis pertahanan “musuh”, termasuk melumpuhkan radar dan penangkus serangan udara (PSU). Setelah sistem Hanud “musuh” lumpuh, tahapan selanjutnya penyerangan dan penghancuran sasaran di darat, seperti markas Lanud, gudang-gudang amunisi, *runway* dan hangar pesawat.

Selang waktu yang tidak lama, dilanjutkan dengan simulasi OLUO, yang diperagakan oleh pesawat-pesawat tempur dalam bentuk *composite strike*. Misi ini secara berturut-turut diperankan oleh empat pesawat Hawk 100/200, delapan F-16 *Fighting Falcon* dan lima pesawat Sukhoi Su-27/30. Ke tujuh belas pesawat membawa puluhan bom jenis MK-82 dan OFAB untuk membombardir sasaran “musuh” di pinggiran pantai Natuna.

Penghancuran sasaran darat oleh kelompok pesawat *striker* tidak mudah, karena pesawat-pesawat “musuh” melaksanakan gangguan melalui kegiatan *combat air patrol* (CAP). Untuk melawan CAP “musuh”, TNI AU mengerahkan satu *flight* pesawat *sweeper* dan satu *flight* pesawat *escort*. *Sweeper* yang diperankan oleh empat pesawat F-16 *Fighting Falcon*, bertugas menghancurkan pesawat-pesawat musuh yang ada di

udara. Sementara *escort* yang diperankan oleh tiga pesawat F-16 *Fighting Falcon* dan tiga Hawk 100/200 bertugas menjaga agar *striker* dapat melaksanakan misi dengan baik. Untuk memperkuat pasukan kawan yang ada di darat, satu *flight* pesawat tempur taktis *Super Tucano* melaksanakan serangan udara langsung (SUL) ke daerah “musuh”. Puluhan bom MK-81 dimuntahkan dari pesawat-pesawat buatan Brasil ini. Berikutnya satu *flight* pesawat Hawk 100/200 juga melaksanakan Bantuan Tembakan Udara (BTU). Untuk menguasai wilayah yang diduduki “musuh”, selanjutnya dilakukan operasi penerjunan perebutan dan pengendalian pangkalan udara (OP3U). ratusan prajurit Paskhas diterjunkan dari pesawat-pesawat C-130 Hercules. Dari ketinggian 1500 *feets*, ratusan pasukan payung TNI AU diturunkan, untuk menguasai dan mengoperasionalkan kembali pangkalan udara, sehingga dapat digunakan untuk mendukung operasi lanjutan.

Dalam misi OSUS, disimulasikan sebuah pesawat tempur TNI AU tertembak “musuh”. Namun, pilot dapat menyelamatkan diri dengan meloncat dari pesawat menggunakan kursi lontar (*eject*). Untuk menyelamatkan pilot yang jatuh di daerah “musuh”, TNI AU melaksanakan operasi combat SAR (*search and rescue*) dengan menggunakan helikopter SA-330 Super Puma.

Aksi penyelamatan pilot oleh tim SAR, menjadi salah satu adegan yang cukup menegangkan. Dua belas personel tim *combat* SAR dari Paskhas, yang diluncurkan dari helikopter, harus berjuang melaksanakan penyelamatan pilot. Di tengah desingan tembakan peluru musuh, tim combat SAR Paskhas diturunkan dari helikopter melalui teknik *repelling*. Dalam hitungan menit, mereka mampu menyelamatkan pilot sekaligus membawa ke daerah aman untuk diberikan pertolongan. (Wibowo, 2016)

**Tabel 4.1 – Pelibatan dan Dislokasi Pesawat terkait Pelaksanaan  
Latihan Puncak Angkasa Yudha 2016**

NO	PESAWAT	JUMLAH	SKADRON	MISI	DISLOKASI
<b>TEMPUR</b>					
1	SUKHOI SU 27/30	3	SKADUD 11	2 SU-27/30 SWEEPER (A/A) 1 STATIC SHOW	RANAI
		5		5 SU-30 OLUO	BATAM
2	F-16	8	SKADUD 3	2 F-16 D/C AIR COVER (OP3U) 2 F-16 SEAD 4 F-16 OLUO	RANAI
		5	SKADUD 16	4 F-16 OLUO 1 F-16 STATIC SHOW	
3	T-50I	8	SKADUD 15	4 T-50 OSUS 3 T-50 COVER (SARPUR)	RANAI
				1 STATIC SHOW	
4	HAWK	5	SKADUD 1	4 HAWK OLUO 1 STATIC SHOW	RANAI
		4	SKADUD 12	4 HAWK SUL	
5	EMB-314 SUPER TUCANO	8	SKADUD 21	4 TUCANO SUL 3 TUCANO BTU	SUPADIO SUPADIO
				1 STATIC SHOW	RANAI
<b>ANGKUT</b>					
6	C-130	3	SKADUD 31	JUN SATPUR	HALIM
		6	SKADUD 32	3 JUN SATPUR 2 JUN CDS 1 AIR LANDED	
7	C-295	3	SKADUD 2	1 C-295 JUN DALPUR	SUPADIO

				2 C-295 JUN SATPUR	
<b>8</b>	C-212	3	SKADUD 4	JUN HELIBOX	RANAI
<b>HELIKOPTER</b>					
<b>9</b>	NAS 332	3	SKADUD 6	SARPUR	RANAI
<b>10</b>	SA 330	3	SKADUD 8	1 SARPUR	RANAI
				2 STBY SAR	BATAM SUPADIO
<b>11</b>	PTTA	4	SKADUD 51	3 PTTA	RANAI
				1 STATIC SHOW	
<b>VIP/VVIP</b>					
<b>12</b>	B 737	3	SKADUD 17	DUK VIP/VVIP	HALIM

(Sumber: Majalah Suara Angkasa TNI AU edisi Oktober 2016)



Di kabupaten ini terdapat 350 pulau, dengan 48 pulau (13.7%) yang berpenghuni dan sebagian besar pulau (302 buah) tidak berpenghuni. Tiga pulau terbesar di antaranya adalah Pulau Bunguran, Pulau Jernaja dan Pulau Serasan, Pulau-pulau yang ada data dikelompokkan dalam 3 gugusan yaitu gugusan Pulau Anambas (pulau-pulau di Siantan dan Jemaja), gugusan Pulau Natuna (pulau-pulau di Bunguran, Sedanau Midai, Pulau Laut, Pulau Tiga), serta gugusan Pulau Serasan (pulau-pulau di Serasan, Subi Besar dan Subi Kecil). Kepulauan Natuna adalah salah satu pulau terluar Indonesia sehingga disebut gugusan pulau terdepan. Karena letaknya yang di perbatasan ini, Kepulauan Natuna menjadi sangat rentan terhadap ancaman-ancaman terutama yang bersifat invasif ataupun material. Terletak di perairan Laut China Selatan (yang sekarang berubah menjadi: Laut Natuna Utara), posisi Kepulauan Natuna sangat jauh dari Ibukota provinsi Kepulauan Riau (Tanjung Pinang) dan tentunya Ibukota negara (Jakarta).

### **Karakteristik Wilayah**

#### **Kondisi Iklim**

Iklim di Kepulauan Natuna sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli. Curah hujan rata-rata setahun berkisar 268,0 milimeter dengan rata-rata kelembaban udara sekitar 81,4% dan temperatur berkisar antara 27-30<sup>0</sup>C.

#### **Topografi**

Berdasarkan kondisi fisiknya, Kepulauan Natuna merupakan tanah berbukit dan bergunung batu, dataran rendah dan landau banyak ditemukan di piggir panrai. Ketinggian wilayah antara kecamatan cukup beragam, yaitu berkisar antara 3-959 m dari permukaan laut dengan kemiringan antara 2-5 m. pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan yang tanah dasarnya mempunyai bahan granit dan alluvial serta tanah organosonol dan humus.

#### **Penduduk**

Penduduk Kepulauan Natuna tahun 2018 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna) berjumlah 76.192 jiwa, terdiri dari 39.180 jiwa penduduk laki-laki dan 37.012 jiwa penduduk perempuan, dengan laju pertumbuhan per

tahun 3.69%, dengan *sex ratio* 106, yang artinya dari 100 perempuan, terdapat 106 laki-laki di Kabupaten Natuna.

### **Potensi**

Selain letaknya yang strategis, kawasan Kepulauan Natuna dan sekitarnya pada hakikatnya dikaruniai serangkaian potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara memadai atau ada yang belum sama sekali, yang meliputi sumber daya perikanan laut yang mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun dengan total pemanfaatan hanya 36%, yang hanya sekitar 4,3% oleh Kepulauan Natuna. Pertanian dan perkebunan seperti ubi-ubian, kelapa, karet, sawit dan cengkeh. Obyek wisata: bahari (pantai, selam), gunung, air terjun, gua, dan budidaya. Sedangkan untuk sumber daya mineralnya sendiri, cadangan minyak Natuna diperkirakan pada 14.386.470 barel dan gas bumi sebanyak 112.356.680 barel.

## **4.2 Analisis Data dan Interpretasi Hasil**

### **4.2.1 Peran Latihan Puncak Angkasa Yudha sebagai Instrumen Diplomasi Pertahanan Indonesia di Kepulauan Natuna**

Lokasi Kepulauan Natuna yang terletak dekat dengan Laut China Selatan yang sedang mengalami konflik antara negara-negara ASEAN dan China. Walaupun Indonesia mengaku bahwa tidak menjadi negara klaiman di sana, akan tetapi, pada kenyataannya wilayah ZEE laut kepulauan Natuna diklaim oleh negara China yang termasuk ke dalam *nine-dash line*. *Nine-dash line* adalah klaim dari negara China yang mengatakan bahwa daerah yang melingkupi 9 garis putus-putus adalah termasuk wilayah tradisional menangkap ikan China (*traditional fishing ground*), sehingga China merasa memiliki wilayah perairan Laut China Selatan tersebut. *Nine-Dash Line* atau Sembilan Garis Putus-Putus berpusat di sekitar Kepulauan Spratly dan pembangunan basis militer di atas daerah karang Scarborough (*Scarborough Shoal*). *Nine-dash line* dibuat oleh China dengan ambisi menghidupkan kembali Jalur Sutera

Maritim atau *Maritime Silk Road* yang membentang dari Asia Tenggara hingga ke daratan Eropa.

Isu Laut China Selatan naik ke permukaan sejak tahun 2014 lalu yang dimulai ketika kilang minyak China 'His Yang Shi You (HYSY) 981' melakukan pengeboran minyak yang masih masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landasan kontinental Vietnam. Hal ini tentunya menciptakan ketegangan di antara Vietnam dan China. Selanjutnya China mengklaim Kepulauan *Spratly* di Laut China Selatan dan beberapa batas wilayah laut lainnya yang dikenal dengan istilah *Nine Dash Line* atau Sembilan Garis Putus-putus yang bersinggungan dengan batas teritorial beberapa negara ASEAN. Dasar pendapat China dalam mengklaim wilayah tersebut adalah *Traditional Fishing Ground* atau Daerah Kebiasaan Melaut Tradisional para nelayan China bagian selatan yang katanya mencapai daerah Kepulauan *Spratly* dan sekitarnya.

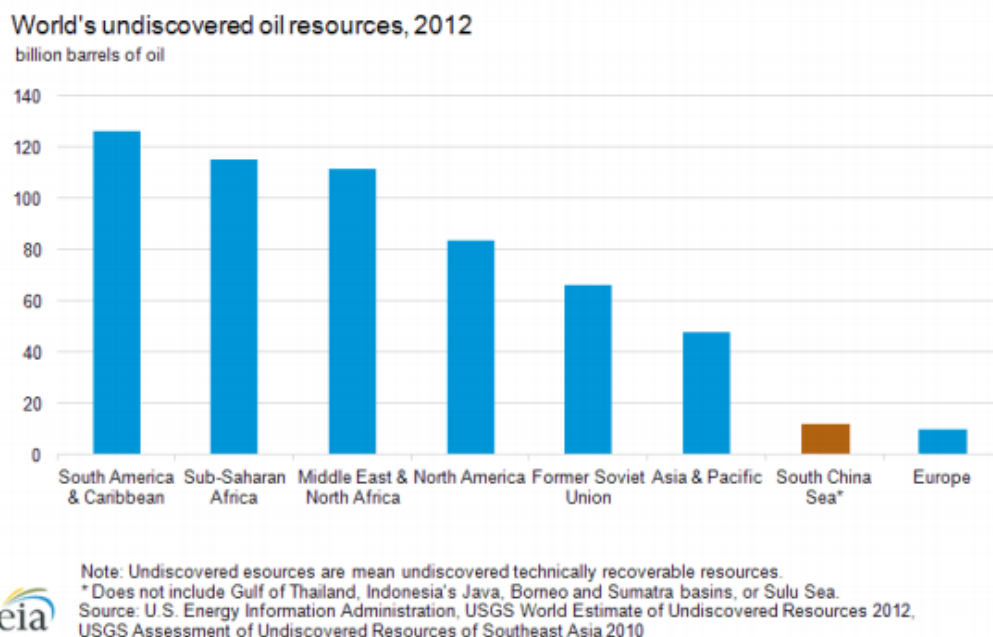


Gambar 4.4 – Peta Konflik Laut China Selatan dan Negara-Negara yang Bersengketa  
Sumber gambar: <http://apdf-magazine.com/chinas-most-dangerous-game/>.

Adapun beberapa *Point statement* dari Kementerian Luar Negeri atas persoalan *9 dash lines*:

1. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan pemerintah Republik Rakyat China tak pernah menjelaskan apapun soal *nine-dashed lines*, yakni garis imajiner yang digunakan China untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia.
2. *Nine-dashed lines* China tiba-tiba masuk merusuk ke wilayah ZEE (zona ekonomi eksklusif) Indonesia. Atas latar belakang ini muncul persoalan antara Indonesia dengan China (Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI)
3. Indonesia pertama kali tahu soal *nine-dashed lines* 23 tahun lalu yaitu pada tahun 1993, pada *Workshop On Managing Potential Conflicts In The South China Sea*. Kala itu delegasi china mendistribusikan satu peta yang di dalamnya tercantum *nine-dashed lines* menjorok hingga perairan Natuna.

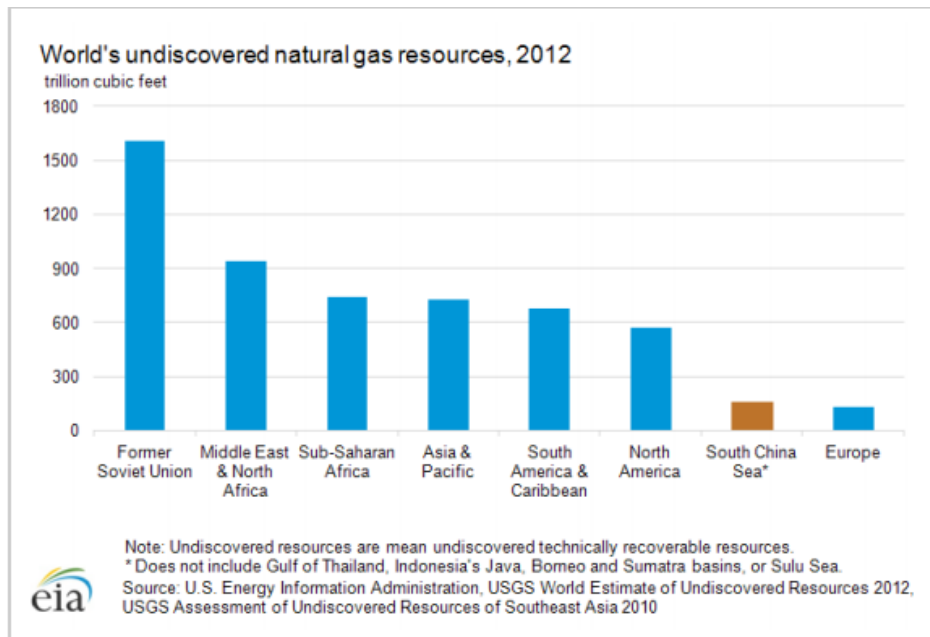
Mengapa kemudian Laut China Selatan menjadi perebutan oleh negara China serta beberapa negara ASEAN (Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam) dan bahkan Taiwan? Tertuang dalam tulisan “Implementasi Ketahanan Nasional dalam Menghadapi Agresifitas China di Laut China Selatan Guna Mendukung Pembangunan Pertahanan Republik Indonesia” oleh Akhmad Hanan (2018), bahwa sumber daya alam di sekitar Laut China Selatan sangatlah kaya, di antaranya:



Gambar 4.5 – Grafik sumber daya minyak dunia yang belum dieksplorasi

Sumber: <https://www.eia.gov/beta/international/>

- a. Laut China Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam khususnya minyak bumi dan gas alam yang terbesar kedua setelah Teluk Persia. Dalam kurun waktu 1984 sampai dengan 1986, *South China Sea Oceanography Institute* dari *China Academy of Science* melakukan survey multidisiplin di Kepulauan Spratly, China, memperkirakan potensi sumber daya alam minyak di Laut China Selatan sebesar 213 miliar barel (bbl) sementara *United States Geological Survey (USGS)* pada tahun 1993 hingga 1994 memperkirakan total kandungan minyak bumi sebesar 28 miliar bbl. Hasil ini menunjukkan bahwa Kepulauan Spratly dan Paracel memiliki kandungan minyak yang sangat besar sekitar 105 miliar bbl (yang belum dieksplorasi).



Gambar 4.6 – Grafik sumber daya gas alam dunia yang belum dieksplorasi

Sumber: <https://www.eia.gov/beta/international/>

- b. Kandungan gas alam di Laut China Selatan sangat besar, USGS menunjukkan sekitar 60% hingga 70% sumber daya alam di area Laut China Selatan adalah gas alam. Pada bulan April 2016, *Husky Energy* bekerjasama dengan *China National Offshore Oil Cooperation* mengumumkan telah menemukan cadangan gas alam 4-6 tcf (*trillion cubic feet*) di dekat Kepulauan Spratly. Sebagian besar eksplorasi gas menurut penelitian yang telah dilakukan berada di area perbatasan Laut China Selatan dengan negara-negara anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Tabel 4.2 –Eksplorasi dan Produksi di Laut China Selatan

Country	Estimated production in South China Sea (2011)		Major exploration and production areas	South China Sea contract holders and operators	
	Oil (1000 barrels/day)	Natural gas (billion cubic feet)		National oil companies	Foreign firms
Brunei	120	400	Baram Delta	PetroleumBRUNEI	BHP Billiton, ConocoPhillips, Hess Corporation, Kulczyk Oil Ventures, Mitsubishi Corporation, Murphy Oil, PETRONAS, Polyard Petroleum, QAF Brunei, Shell, Total
China	250	600	Pearl River Mouth Basin	CNOOC	BG Group, BP, Chevron, ConocoPhillips, Eni, ExxonMobil, Husky, Newfield, Shell, Total
			Qiongdongnan Basin	Sinopec, CNPC	
Indonesia	60	200	Natuna Basin	PT Pertamina (Persero)	PetroChina, Chevron, CNPC, ConocoPhillips, Eni, ExxonMobil, Husky, KUFPEC, PETRONAS, Santos, Statoil, Total
Malaysia	500	1000	Sabah Sarawak Malay Basin (with Thailand)	PETRONAS	Lundi, BHP Billiton, ConocoPhillips, ExxonMobil, Hess, KUFPEC, MDC O&G, Murphy Oil, Newfield, Nippon, Petrofac, Roc Oil, Shell, Talisman Energy
The Phillipines	25	100	Palawan Basin	PNOC	ExxonMobil, Shell
Thailand	-	-	Gulf of Thailand Malay Basin (with Malaysia)	PTTEP	BG Group, Chevron, Shell
Vietnam	300	300	Cuu Long Basin Nam Con Son Basin	PetroVietnam	KNOC, ConocoPhillips, Geopetrol, Premier Oil,

					PTTEP, Santos, SK Corp, Total, Zarubezhneft
--	--	--	--	--	---

\*Produksi minyak termasuk yang kurang terkondensasi

Sumber: *U.S. energy information administration Oil & Gas Journal, HIS, CNOOC, PFC Energy*

Sementara itu, sejak tahun 1989, China telah membangun 10 ladang minyak dan gas, tujuh di antaranya dibangun di utara Laut China Selatan termasuk di antaranya tiga ladang minyak dan gas utama yang akan dibangun, yaitu Huizhou 26-1 dieksplorasi dan dieksploitasi oleh China, Italia dan Amerika, Xijiang 24-3 bekerjasama dengan China dan the Phillip Corporation, dan Teluk Beibu 11-4 dieksplorasi oleh China.

Ladang gas Yazhou di Laut China Selatan dikelola oleh China dan perusahaan Amerika dan diperkirakan memiliki cadangan gas alam sebanyak 90 hingga 100 miliar m<sup>3</sup>. Kilang minyak dan gas utama di Laut China Selatan yaitu:

- a. Area Mulut Basin Sungai Zhuijiang (diperkirakan berisi 4-45 miliar ton minyak)
- b. Area Basin Laut Yingge (diperkirakan berisi 0,4-0,5 miliar ton minyak)
- c. Area Basin Teluk Beibu (diperkirakan berisi 0,4-0,5 miliar ton minyak)
- d. Area Basin Zengmu (diperkirakan berisi cadangan minyak 13,7 miliar ton minyak)

Dalam perencanaan mendatang, China akan membangun tiga ladang minyak terdiri dari ladang minyak Lufeng (Lufeng 22-1, Lufeng 13-1 dan Lufeng 13-2), Liuhua 11-1, dan Wencheng 9-2.

Selain potensi dari minyak dan gas alam, Laut China Selatan memiliki berbagai macam potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, di antaranya:

- a. Terdapat sekitar 1.787 spesies ikan, ikan demersal paling banyak seperti spesies *Pseudoscianena crocea*, *uraenesox cinereus*, *Nibeia*

*albiflora*, *Miichthys miiuy*, *Collichthys lucidus*, *Paragyrops edita*, *Ephinephelus awoara*, dan *Lutjanus sanguineus*. Ikan pelagis antara lain adalah, *Trachurus japonicus*, *Illisha elongate*, *Scomberomorus guttatus*, *Sardinella aurita* dan *Decapterus maruadsi*.

- b. Terdapat formasi gugusan karang (*Coral reef*) yang sangat penting,
- c. Batas wilayah ekologi terrestrial yang memiliki banyak keragaman tumbuh-tumbuhan, di antaranya:
  - i. Hutan hijau subtropis Jian Nan,
  - ii. Peternakan ikan Mai Po Marsh, Hongkong
  - iii. Hutan hijau subtropis Taiwan,
  - iv. Hutan hujan moonsoon Taiwan Selatan,
  - v. Hutan hujan Luzon,
  - vi. Hutan hujan Mindoro,
  - vii. Hutan hujan Palawan,
  - viii. Hutan hujan dataran rendah Borneo,
  - ix. Hutan bakau beting Sunda,
  - x. Hutan rawa gambut Borneo/Kalimantan,
  - xi. Hutan daratan Sunda,
  - xii. Hutan hujan Semenanjung Malaysia,
  - xiii. Hutan bakau Indochina,
  - xiv. Hutan kering daratan rendah Selatan Vietnam,
  - xv. Hutan hujan daratan rendah Utara Vietnam,
  - xvi. Hutan rawa air tawar Red River,

xvii. Hutan hijau subtropis Selatan China-Vietnam.

Dengan begitu kayanya kandungan kekayaan sumber daya alam yang terdapat di sekitar Laut China Selatan, termasuk pula perairan Natuna, maka tidak heran jika daerah tersebut sampai diperebutkan banyak negara. Belum lagi daerah tersebut juga termasuk jalur lintas perdagangan internasional. Hal tersebut semakin menambah kompleks masalah, karena apabila daerah tersebut dikuasai oleh satu negara saja, maka kestabilan kawasan tersebut tentu akan terganggu.

Seperti yang kita tahu, Kepulauan Natuna adalah salah satu pulau terluar Indonesia di bagian utara yang berada di tengah Laut China Selatan dan mengingat lokasinya yang dekat dengan daerah potensi konflik Laut China Selatan, bukan tidak mungkin jika suatu saat konflik Laut China Selatan pecah menjadi perang terbuka antar negara dalam memperebutkan wilayah tersebut, Kepulauan Natuna juga akan terkena imbasnya. Pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU yang dilaksanakan pada 6 Oktober 2016 adalah salah satu upaya strategis dan termasuk sebagai *deterrent effect* atau daya tangkal terhadap ancaman konflik dan krisis kedaulatan wilayah daerah terluar terkait dengan ketegangan di Laut China Selatan.

Terkait tentang Latihan Puncak Angkasa Yudha dalam memberikan efek *deterrence*, Bapak Letkol Nav Sonni Benny Simanjuntak dari pihak Operasi Markas Besar TNI AU mengatakan bahwa,

*“Tujuan dan Sasaran dari Latihan Puncak Angkasa Yudha itu sendiri adalah memelihara dan meningkatkan kemampuan dari satuan-satuan TNI AU hingga ke tingkat kotama. Ia juga merupakan menjadi bahan evaluasi untuk menilai kekuatan dan kekurangan dari TNI AU itu sendiri. Terkait dengan efek ‘deterrence’, Latihan Puncak Angkasa Yudha di Natuna memang dimaksudkan untuk memberikan efek psikologis dan efek jera terhadap China ataupun negara lain yang bermaksud untuk mengganggu kedaulatan kita di sana.”* – Komunikasi personal dengan Letkol Nav Sonni Benny Simanjuntak, Markas Besar Angkatan Udara, Cilangkap, 25 Februari 2019.

Ditambahkan dari Kolonel Oktaheroe dari Kementerian Pertahanan tentang pemindahan Latihan Puncak Angkasa Yudha di Natuna yang merupakan suatu bentuk penyampaian pesan.

*“Kemudian, kenapa ada pemindahan latihan puncak angkasa yudha yang dilaksanakan seharusnya di Bangka Belitung kemudian dipindahkan ke Natuna. Saya pribadi melihat ini lebih kepada makna politik. Karena sebenarnya latihan angkasa yudha ini ...pertama memberikan keterampilan ke pilot kita, bagaimana kita ‘interoperability’ antara senjata yang dimiliki oleh Rusia dengan senjata yang dimiliki oleh Amerika. Kita ‘kan dua-duanya punya. Kemudian dari dua sumber ini kita melakukan latihan secara bersama-sama. Nah kemudian, kenapa Natuna dipilih, kembali lagi. Messages. Bagaimana kita menyampaikan pesan, pesan kepada dunia. Sejak kita bilang bahwa Indonesia ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dikatakan bahwa laut itu adalah sebagai penghubung bukan laut sebagai pemisah. Maka disebutkan dalam Deklarasi Juanda tahun 50-an itu dikatakan dan itu sudah diakui oleh UNCLOS. Indonesia termasuk di dalam salah satu negara kepulauan di dunia. ... Jadi Indonesia itu negara kepulauan. Berarti semua laut yang mengikat di kepulauan Indonesia itu adalah wilayah kedaulatan Indonesia.”*  
 – Komunikasi personal dengan Kol Oktraheroe Rasmi, Direktur Kerjasama Internasional Kementerian Pertahanan, Jakarta, 18 Februari 2019.

Dengan diadakannya latihan tempur yang bahkan disaksikan oleh Presiden, Panglima TNI, Menteri Polhukam dan Menlu, diharapkan menciptakan daya tangkal/efek gentar agar China sebagai agresor di Laut China Selatan tidak serta-merta mengklaim perairan Natuna yang bersinggungan pada *Nine Dash Line*. Efek gentar ini dapat dianggap sebagai bentuk Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam menciptakan keamanan di kawasan rawan konflik tersebut.

#### **4.2.2 Bentuk *deterrent effect* Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU terhadap Pelanggaran Wilayah oleh China di Perairan Kepulauan Natuna**

Menurut hasil wawancara peneliti dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang diwakili oleh Bapak Sahono Budianto, S.St.Pi., M.Si. dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan (PSDKP), bahwa terdapat pengurangan angka pelanggaran pencurian ikan secara ilegal (*IUU Fishing*) secara signifikan di wilayah perairan Indonesia pasca pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU di Kepulauan Natuna pada tahun 2016 lalu.

Tabel 4.3 – Data Negara dan Jumlah Penangkapan Ikan secara Ilegal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2014-2018

NEGARA	TAHUN					JUMLAH PELANGGARAN
	2014	2015	2016	2017	2018	
Indonesia	22	48	23	47	68	201
Vietnam	9	36	83	68	29	225
Filipina	0	8	29	5	5	47
Malaysia	0	10	26	11	7	54
Thailand	7	0	1	0	0	8
China	0	0	1	0	0	1
Timor Leste	0	0	0	1	0	1
<b>Total</b>	38	102	163	132	109	544

Sumber: DirektoratJenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), 2019

Dari tabel di atas tertera bahwa setelah tahun 2016 dimana pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU diadakan, angka pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal (*IUU Fishing*) yang dilakukan oleh negara China jelas mengalami pengurangan. Dari 1 kapal yang ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 (yang juga terkait dengan preseden latihan puncak Angkasa Yudha diadakan), berkurang signifikan menjadi 0 alias tidak ada lagi kapal penangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna. Hal ini berarti membuktikan bahwa Latihan tersebut memiliki efek *deterrence*.

Ditambahkan dari pihak Kemhan, Bapak Kolonel Oktaheroe Rasmi menyampaikan bahwa melalui pelaksanaan Latihan Angkasa Yudha, ada pesan yang ingin ditekankan oleh pihak Indonesia kepada negara China

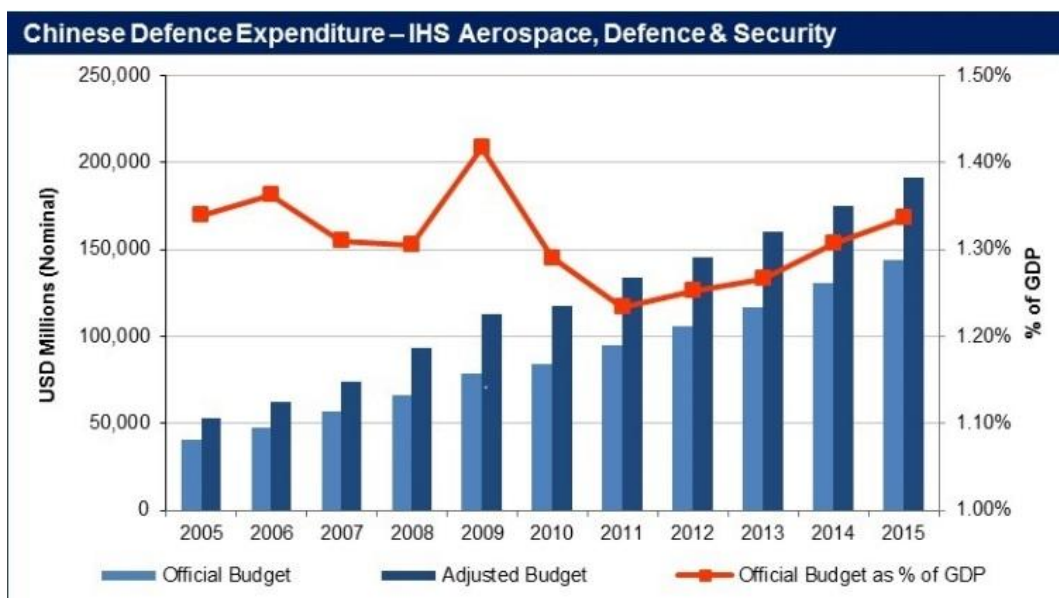
maupun negara-negara lain yang ada di sekitar perairan Kepulauan Natuna, yaitu bahwa Indonesia siap untuk menjaga kedaulatannya, terutama di wilayah perbatasan. Hal ini juga turut menunjukkan bahwa kehadiran negara (*state presence*) di perbatasan sudah dipenuhi oleh Indonesia untuk menegaskan kedaulatan wilayah. Dan ternyata berdasarkan statistik yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, memang menunjukkan setelah pelaksanaan latihan, memang terjadi pengurangan aktivitas penangkapan ikan ilegal terutama oleh China di perairan Kepulauan Natuna.

*“Kapalnya Amerika, baru-baru ini, kapal induk Amerika gara-gara dia melintasi wilayah teritorial Indonesia, hanya dihadapi oleh KAL. KAL itu Kapal Angkatan Laut. Lebih kecil dari kapal patroli, ditembak pake meriam, canon. Dan itu gak bakalan mempan. Ini raksasa, Goliath, dilempar pake batu kerikil. Ini kayak David dan Goliath lah. Gak bakalan mempan tapi itu cukup untuk membuat Amerika merasa, oh ternyata saya sudah salah, sudah melintasi wilayah yang salah. Mereka kemudian membalik. Nah kemudian, terhadap makin seringnya terjadinya pencurian ikan tersebut, kemudian Angkatan Laut bereaksi, kemudian Pak Jokowi pergi ke Cina, ke Xin Ji Ping. Setelah dari Jepang, ada pertemuan apa, dengan Jepang, dengan Perdana Menteri Jepang, setelah itu pergi, langsung pergi ke Cina. Disana pak Jokowi bertanya sama Xin Jin Ping, sebenarnya kamu mengakui gak sih kedaulatan Indonesia? Langsung, face to face. Apa Xin Jin Ping bilang, iya saya mengakui. Habis itu Pak Jokowi bilang diadakanlah latihan, bukan angkasa yudha. Tapi latihan gabungan TNI tahun 2016. Setelah latihan situ, Pak Jokowi berdiri di atas kapal Imam Bonjol. Kemudian diliput oleh banyak media. Kapal itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kapal Amerika atau kapal destroyer-nya Cina, gak ada apa-apanya. Tetapi itu bermaksud untuk menyampaikan pesan pada dunia bahwa, ini loh Indonesia. Indonesia tidak, apa, tidak ragu-ragu apabila ada negara yang coba-coba melakukan intervensi atau melakukan hal-hal yang dilarang sesuai dengan prinsip kedaulatan ini kan berhadapan dengan angkatan bersenjata Indonesia, dengan TNI.”*

– Komunikasi personal dengan Kol Oktraheroe Rasmi, Direktur Kerjasama Internasional Kementerian Pertahanan, Jakarta, 18 Februari 2019

Perumpamaan *David versus Goliath* yang disampaikan Kolonel Oktaheroe bukan tanpa dasar. Karena jika dilihat perbandingan dari anggaran Pertahanan saja, Indonesia memang tertinggal jauh dari China. Berikut dipaparkan perbandingannya:

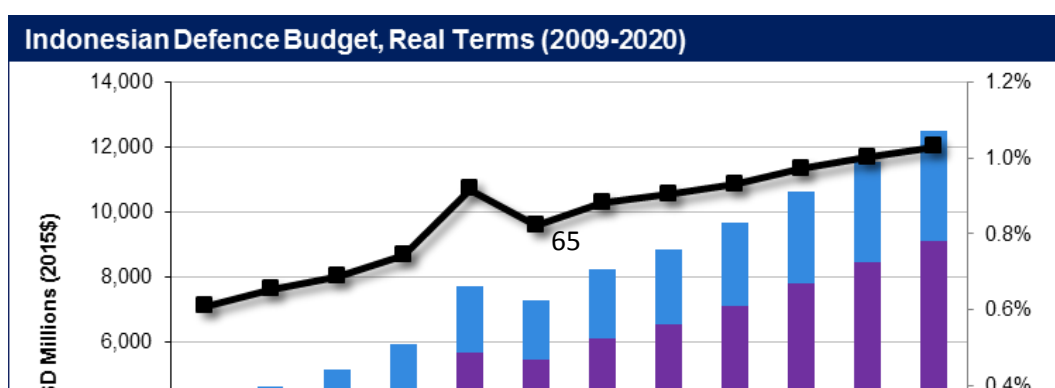
Gambar 4.7 – Grafik Anggaran Pertahanan China pada tahun 2005-2015



Sumber: <https://www.janes.com/article/49742/china-s-defence-budget-more-than-doubles-since-2008>

Pengeluaran militer (Anggaran Pertahanan) di China meningkat menjadi \$ 225,712.60 juta USD pada tahun 2016 dari \$ 214,093.10 juta USD pada tahun 2015. Pengeluaran militer di China rata-rata \$ 86,417.27 juta USD dari tahun 1989 hingga 2016 dan rekor terendah \$ 20,226 juta USD pada tahun 1989.

Gambar 4.8 – Grafik Anggaran Pertahanan Indonesia pada tahun 2009-2020



Sumber: <https://news.ihsmarket.com/press-release/aerospace-defense-security/indonesia-will-have-fastest-growing-defence-budget-asia-pac>

Sementara itu, jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan Indonesia adalah hanya sebesar \$ 8950 juta dollar atau kira-kira 99.462 miliar rupiah (tertinggi ke-2 dari 34 kementerian). Sangat jauh berbeda dengan China yang sangat besar. Pada tahun 2017, China menempati ranking ketiga dunia militer terbesar adalah Amerika Serikat dan Rusia dari total 133 negara. Sementara itu, Indonesia berada di urutan 14 dunia (*2017 Military Strength Ranking*)

Meskipun perbedaan anggaran pertahanan yang sangat timpang, Indonesia tetap berusaha membangun postur pertahanannya. Terutama di wilayah perbatasan. Adapun detail tentang rencana pembangunan militer di Natuna, sebagai berikut:

Gambar 4.9 – Pembangunan kekuatan militer di wilayah Kepulauan Natuna



Figure 8 Construction of a New Naval Port in Selat Lampa, Natuna Figure 9 Construction of Composite Battalion Headquarter in Natuna



Figure 10 Cavalry Unit Stationed in Natuna



Figure 11 Construction of Military Housing in Natuna

(Sumber: The Habibie Center Research – *Indonesia, South China Sea and the Law of the Sea*)

- a. Pembangunan pangkalan militer di Natuna penting untuk menjaga sumber daya alam di kawasan itu. Tak cuma di Natuna, pangkalan militer akan dibangun di wilayah-wilayah lain yang berada di garis terluar perbatasan Indonesia,
- b. Pangkalan militer di Natuna akan dilengkapi tiga kapal perang TNI Angkatan Laut, kapal selam, satu pesawat tempur, radar, dan drone penangkis serangan udara. Pelabuhan di Natuna juga akan diperbaiki, sedangkan landasan pacunya diperlebar untuk tempat mendarat pesawat tempur,
- c. Dari segi penguatan personel, dalam perkembangannya satu kompi marinir dan satu kompi korps Korps Pasukan Khas (Paskhas) TNI Angkatan Udara. Satu kompi Paskhas terdiri dari 150 sampai 200

personel. Satuan ini memiliki kemampuan tempur darat, laut, dan udara sekaligus,

- d. Sementara TNI Angkatan Darat di Natuna akan dilengkapi dengan satu Batalyon Raider yang merupakan salah satu pasukan elite TNI,
- e. TNI AL di Natuna sudah dilengkapi sejumlah armada perang untuk kekuatan perang KRI secara rutin beroperasi di perairan ZEE Indonesia. Bahkan akan didukung pasukan gabungan dari seluruh satuan TNI AL (komposit) sekitar 205 personel ditambah prajurit Lanal,
- f. Kekuatan TNI AL di Natuna, saat ini sudah didukung infrastruktur pertahanan laut. Di antaranya Markas Lanal, Kompi Komposit TNI AL, Posal-posal hingga pelabuhan sandar KRI, pelabuhan pendaratan pasukan serta pelabuhan pangkalan kapal selam (target tahun 2018 selesai).

Pembangunan pertahanan negara diselenggarakan untuk mewujudkan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter menuju kekuatan maritime regional yang disegani di kawasan Asia Pasifik dengan prinsip defensive aktif dalam rangka menjamin kepentingan nasional. Usaha pertahanan negara diselenggarakan melalui pembangunan postur pertahanan negara secara berkesinambungan untuk mewujudkan kekuatan, kemampuan dan gelar. Pembangunan militer diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pokok minimum (*Minimum Essential Forces /MEF*) komponen utama dan menyiapkan komponen lainnya sebagai pendukung. Ini merupakan implementasi dari Asas Ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nasional yang salah satunya mengenai Asas Kesejahteraan dan Keamanan.

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan strategi pertahanan baru yang berfokus pada tiga prioritas, yaitu menjadi titik tumpu global maritim (*Global Maritime Fulcrum*), memenuhi target minimum *essential*

*forces* (MEF) dan menjalankan program pertahanan negara selama 10 tahun ke depan. Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan dilakukan melalui:

- a. Pertama, pengintegrasian peran & fungsi kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dengan memaksimalkan peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan secara terpadu; dan
- b. Kedua, optimalisasi upaya diplomasi secara bilateral maupun multilateral dengan mengedepankan penyelesaian masalah perbatasan secara damai Bersama negara-negara tetangga.

Dengan fakta-fakta lapangan ini membuktikan bahwa Latihan Puncak Angkasa Yudha ini merupakan instrumen Diplomasi Pertahanan yang efektif untuk memberikan efek jera (*deterrence*) bagi para pelanggar wilayah di wilayah perairan Kepulauan Natuna, terutama oleh negara China. Dengan kehadiran kekuatan di perbatasan menjadi suatu simbol kehadiran negara (*state presence*) untuk menyampaikan pesan bahwa bahkan di perbatasan sekali pun, negara Indonesia tetap mengencangkan ikat pinggangnya dan tidak akan gentar ataupun mundur dalam upaya penegakan kedaulatan. Di Kepulauan Natuna sendiri, peningkatan kapabilitas pun telah dilaksanakan, contohnya penambahan panjang *runway* bandara Ranai yang dapat digunakan untuk menampung pesawat F-16 yang diletakkan di Lanud Roesmin Nurjadin yang terletak di provinsi tetangga, provinsi Riau. Sehingga apabila terdapat ancaman-ancaman yang sewaktu-waktu dapat terjadi, pesawat F-16 dapat segera didatangkan ke Kepulauan Natuna. Hal ini tentu memberikan efek *deterrence* yang nyata di kawasan Kepulauan Natuna.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Pelaksanaan Angkasa Yudha di Kepulauan Natuna sebagai Bentuk Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Pelanggaran Wilayah oleh China

Tujuan dilaksanakannya latihan militer selain untuk unjuk kekuatan (*show of force*), bertujuan untuk mengukur kapabilitas personil. Dalam perspektif Diplomasi Pertahanan hal ini dipandang sebagai *Capacity Building* atau pembangunan kekuatan militer. Pasca pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha, Panglima Gatot Nurmantyo menekankan bahwa pelaksanaan Latihan Angkasa Yudha di Natuna bukanlah suatu usaha untuk unjuk kekuatan atau *show of force* melainkan hanya sebagai latihan rutin. Namun dilansir dari The Strait Times, beliau mengatakan bahwa akan menganggap sebagai pujian apabila hal tersebut dianggap sebagai *show of force*. Panglima TNI juga memastikan bahwa upaya di Natuna tersebut tidak dimaksudkan untuk menanggapi ketegangan dengan pemerintah China terkait dengan konflik di Laut China Selatan, melainkan untuk menjaga keutuhan Negara Indonesia secara keseluruhan. (Latihan Tempur Angkasa Yudha 2016 di Kawasan Natuna, 2016)

Namun, menurut beberapa pengamat kawasan, kegiatan ini tergolong suatu upaya Diplomasi Pertahanan oleh Indonesia. Adapun menurut Iis Gindarsah seperti yang dilansir oleh The Strait Times, pelaksanaan latihan tempur tentara di perbatasan adalah suatu hal yang lumrah dan hal ini dikenal sebagai salah satu kegiatan diplomasi pertahanan. Dimana hal ini diharapkan memberikan efek *deterrent* atau daya tangkal bagi pihak-pihak yang hendak melakukan hal yang mengancam kedaulatan negara di wilayah perbatasan. (Wahyudi Soeriaatmadja, 2016)

Menurut Gregory Winger dalam tulisannya *The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy* (2014), bahwa Diplomasi Pertahanan adalah tentang penggunaan instrumen-instrumen pertahanan (personil

militer contohnya) di masa damai untuk berbagai kegiatan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Winger menekankan pada penggunaan *soft power* bukan *hard power* untuk menyampaikan maksud dari negara asal.

Tabel 2.2 – Tipe-tipe Kekuatan Negara berdasarkan Gregory Winger

The Types of Power:

Type of Power	Mechanism	Illustration
Hard Power	Coercion	Country B does what Country A wants because Country A would harm B if it does not comply
Economic Power	Incentive	Country B does what Country A wants because Country A will reward Country B for complying
Soft Power	Co-Option	Country B does what Country A wants because B is convinced that what A wants is best.

Sumber: Gregory Winger dalam *The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy* (2014)

Pada tabel di atas terlihat bahwa penggunaan *soft power* pada praktek diplomasi pertahanan ditekankan pada *co-option* atau opsi bersama, yakni yang diumpamakan Winger saat Negara B melakukan apa yang Negara A mau karena negara B yakin bahwa pilihan yang diberikan A yang terbaik. Pada kasus ini terlihat bahwa China diyakinkan oleh Indonesia melalui instrumen militernya (Latihan Angkasa Yudha) untuk menghentikan sikap invasifnya di Perairan Natuna. Hal ini untuk menjaga hubungan baik kedua negara itu sendiri.

Sesuai dengan teori yang diajukan oleh Winger, bahwa diplomasi pertahanan adalah penggunaan instrument militer dalam masa damai untuk memajukan kepentingan nasional suatu negara. Jika menurut Cottey & Foster diplomasi pertahanan penggunaan instrument militer yang diutamakan dengan konsep membangun kerjasama militer (*confidence building measure*), peningkatan kapabilitas (*capacity building*) dan industri

pertahanan (*defense industries*), maka Winger menekankan bahwa ketika instrument militer atau pertahanan dipakai untuk membantu negara dalam pencapaian kepentingan nasional terutama dengan negara lain ataupun untuk perpanjangan tangan negara di dalam atau pun luar negeri, di sinilah diplomasi pertahanan juga bermain.

Terkait dengan perkara hak Indonesia di wilayah ZEE perairan Natuna sendiri, dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* dituliskan bahwa: “*In the exclusive economic zone, the coastal state has sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting...*”. Dalam artikel ‘Sovereignty’ versus ‘Sovereign Rights’ yang tulis Jean Christou pada laman CyprusMailOnline.com, menurut UN *Special Adviser*, Espen Barth Eide, bahwa memang hak negara di wilayah ZEE ada suatu kebingungan di dalamnya. Menurutnya *sovereignty* (kedaulatan) dan *sovereign rights* (hak berdaulat) di wilayah ZEE berbeda. *Sovereignty* (kedaulatan) suatu negara berada di wilayah 12 mil dari landas kontinen, di sini negara memiliki kedaulatan penuh akan segala aktivitas dan eksplorasi baik eksploitasi sumber daya alam. Akan tetapi, *sovereign rights* (hak berdaulat) suatu negara adalah yang terletak pada 200 mil atau yang sering dikenal sebagai zona ekonomi eksklusif. Menurut Eide, karena zona ekonomi bukan merupakan wilayah kedaulatan, siapapun dapat melaksanakan kegiatan apapun di daerah tersebut untuk mengambil sumber bdaya. Tetapi hal itu merupakan isu teknis. Hal tersebut sering sekali menjadi pelanggaran, apalagi jika terjadi eksploitasi.(Christou, 2015)

Sedangkan menurut UNCLOS sendiri, “*coastal states may however in their discretion withhold their consent to the conduct of a marine scientific research project of another state or competent international organisation in the exclusive economic zone or on the continental shelf of the coastal state if that project: (a) is of direct significance for the exploration and exploitation of natural resources, whether living or non-living.*”Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia

sebagai negara kepulauan/pesisir memiliki hak eksklusif yang dijamin oleh UNCLOS untuk mengatur kegiatan di wilayah ZEE itu sendiri. Terutama jika terjadi kegiatan pelanggaran berupa pencurian ikan ilegal.

Dalam pelaksanaan Angkasa Yudha sendiri, dapat dilihat bagaimana instrumen militer, dalam hal ini Latihan Angkasa Yudha TNI AU dimaksudkan pelaksanaannya sebagai penyampaian pesan dari Indonesia terhadap China untuk menghentikan pelanggarannya di wilayah perairan Natuna. Latihan Angkasa Yudha di Natuna di sini berperan sebagai instrumen diplomasi pertahanan Indonesia untuk menyampaikan pesan kepada China dalam rangka mencapai kepentingan nasional Indonesia di perairan Natuna untuk menjaga hak kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) secara utuh di wilayah perbatasan tersebut.

#### **4.3.2 Bentuk *deterrence effect* pasca pelaksanaan Latihan Angkasa Yudha terhadap Pelanggaran Wilayah oleh China**

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, bahwa pasal 19 dalam buku Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa dijelaskan peran dari kekuatan udara. Dituliskan pada doktrin tersebut bahwa peran kekuatan udara pada hakikatnya merupakan aplikasi kemampuan kekuatan udara sebagai suatu kekuatan militer yang dimanifestasikan pada kemampuan Angkatan Udara dalam menyelenggarakan penegakan kedaulatan negara dan hukum di udara, mengelola krisis internasional, dan memelihara perdamaian serta sebagai alat penyelenggara dukungan sosial. Kemudian, pada butir c dijelaskan bahwa kekuatan udara berperan sebagai 'alat penyelenggara pencegah krisis nasional, regional, dan internasional' yang dipaparkan ke dalam 6 poin lanjutan:

- 1) Peringatan. Kekuatan udara berperan untuk memberikan peringatan pada saat yang tepat tentang agresi yang mungkin akan dilakukan oleh musuh.

- 2) Isyarat. Kekuatan udara berperan untuk mengirimkan isyarat politik yang jelas melalui berbagai tindakan, termasuk peningkatan kesiapan secara terbuka, pelatihan, atau penerbangan.
- 3) Dukungan. Kekuatan udara berperan untuk memberikan dukungan moril dan fisik kepada kawan, sehingga memperkuat semangat pada saat moril menurun.
- 4) Pertolongan. Kekuatan udara berperan untuk melakukan operasi pertolongan dalam situasi krisis.
- 5) Peningkatan stabilitas. Kekuatan udara berperan untuk menambah kekuatan lain di wilayah yang terancam huru-hara atau konflik regional, sehingga stabilitas keamanan dapat ditingkatkan.
- 6) Penangkalan. Kekuatan udara berperan sebagai kekuatan penangkalan melalui penggelaran alutsista udara.

Pada poin 3, 4, serta 6 merupakan esensi dari bentuk *deterrence* yang ada dalam tubuh Angkatan Udara itu sendiri. Pada poin 3, yaitu Dukungan, bahwa kekuatan udara berperan memberikan dukungan moril dan fisik kepada kawan, sehingga memperkuat semangat pada saat moril menurun. Jika diaplikasikan pada kasus pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha di Natuna tahun 2016 ini adalah bahwa pelaksanaan latihan tersebut adalah bentuk dukungan kepada rekan sesama TNI, yaitu TNI AL dalam melaksanakan usaha pengamanan laut. Mengawasi dan menangkap pelanggaran yang terjadi di laut sejatinya adalah *domain* TNI AL, namun karena pada tahun 2016 tersebut terjadi salah satu insiden besar yang cukup mengganggu stabilitas kawasan Natuna, TNI AU turut mendukung TNI AL untuk memberikan *deterrence* terhadap China di kawasan tersebut dengan melaksanakan latihan puncak Angkasa Yudha.

Pada poin pertolongan, yaitu bantuan udara pada saat situasi krisis. Situasi kawasan perairan Natuna pasca terjadi insiden menjadi krisis dan cukup tegang. Di sini peran Angkatan Udara juga dibutuhkan untuk

memberi pertolongan, contohnya berupa bantuan penguatan armada untuk *air-surveillance* untuk mengintai perairan Natuna agar terbebas dari kapal-kapal penangkap ikan ilegal. Dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri, Bapak Sahono Budianto menyatakan bahwa KKP juga bekerjasama dengan pihak TNI AU dalam pelaksanaan *air-surveillance*, yaitu untuk menangkap gambar atau foto kapal-kapal asing yang sedang berada di wilayah perairan Natuna. Selanjutnya, gambar tersebut akan diteruskan ke instansi terkait, contohnya Bakamla atau Polisi Air untuk ditindaklanjuti. Pada poin 6 juga jelas tertera bahwa peran kekuatan udara dalam doktrin TNI AU adalah sebagai upaya 'penangkalan' atau sebagai deterensi. Penulis ingin menunjukkan bahwa Latihan Puncak Angkasa Yudha adalah merupakan salah satu wujud penerapan kekuatan udara TNI AU di wilayah Kepulauan Natuna yang berperan untuk menangkal segala niat negatif dari lawan, maupun juga sebagai alat pencegah konflik.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa menurut Mayor Wee, dalam konteks deterensi non-nuklir, pihak-pihak yang memiliki kekurangan baik secara geografis atau angka cenderung untuk melakukan upaya yang lebih banyak serta anggaran yang lebih besar untuk membangun kekuatan deterensi yang mumpuni. Contohnya adalah Singapura dan Korea Selatan. Akan tetapi, beliau juga menulis bahwa bertumpu pada kekuatan militer saja tidaklah cukup untuk mencegah agresi, serta mempertahankan kedaulatan negara-negara non-nuklir ini. Deterensi konvensional harus didukung oleh diplomasi, aliansi politik, kerjasama ekonomi untuk menjadi lebih efektif dalam menangkal agresor. (Peow, 2014) Dalam tesis ini, yang menjadi upaya deterensi dari Indonesia untuk membuat China jera dalam melakukan pelanggaran, adalah Latihan Angkasa Yudha dan juga pembangunan kapabilitas militer di wilayah Natuna. Bahwa dengan melaksanakan Latihan Angkasa Yudha di wilayah Natuna dan pembangunan kapabilitas militer di Natuna menyampaikan pesan bahwa Indonesia siap dengan kapabilitas militernya apabila sewaktu-waktu ada serangan militer atau invasi di wilayah Natuna. Meskipun apabila dibandingkan kekuatan militer Natuna dengan Indonesia

memang jauh tertinggal, tetapi dengan melakukan Latihan Puncak Angkasa Yudha menunjukkan keseriusan Indonesia untuk melindungi wilayah kedaulatan Indonesia dan komitmen negara untuk hadir di perbatasan. Inilah salah satu deterensi paling efektif yaitu kehadiran negara di perbatasan dalam bentuk pembangunan kapabilitas militer.

Hal ini didukung oleh pendapat dari Profesor Indria Samego pula dalam wawancaranya dengan Majalah Suara Angkasa TNI AU edisi Oktober 2016, terkait sikap Indonesia terhadap konflik Laut China Selatan dan juga sikap ekspansif China yang mengklaim ZEE wilayah perairan Natuna, yang harusnya menjadi sorotan adalah bagaimana Indonesia bisa mengelola *pressure* atau tekanan permasalahan dengan menekankan hubungan diplomasi, selain penguatan alutsista. Menurut beliau, penguatan alutsista akan menciptakan *security dilemma* yang tidak akan berakhir. Namun bukan berarti kita abaikan *deterrent effect*, caranya adalah paling tidak sampai garis ZEE serta landas kontinen Indonesia, negara wajib hadir di situ (*state presence*). (Prof Dr Indria Samego: Profesionalisme TNI dengan Reward yang Diberikan oleh Negara, 2016) Hal ini juga didukung dengan pernyataan yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, "Presiden mengatakan bahwa pulau-pulau terluar Indonesia harus dikuatkan. Jadi ini adalah bagian implementasi dari kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperkuat pulau-pulau terluar di Indonesia. Jadi intinya adalah kita meningkatkan presensi, baik dari presensi ekonomi, sosial dan lainnya di Natuna." (Latihan Tempur Angkasa Yudha 2016 di Kawasan Natuna, 2016) Hal ini membuktikan bahwa pengembangan kapabilitas militer di Natuna serta pelaksanaan latihan puncak Angkasa Yudha di Kepulauan Natuna menjadi bentuk deterensi melawan tekanan dari China di wilayah tersebut.

## BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

- 1) Peran Latihan Puncak TNI AU Angkasa Yudha dalam menghadapi pelanggaran wilayah oleh China di perairan Kepulauan Natuna adalah sebagai instrumen diplomasi pertahanan Indonesia. Sesuai dengan teori diplomasi pertahanan oleh Gregory Winger dimana diplomasi pertahanan adalah penggunaan instrumen pertahanan dalam masa damai untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Dalam kasus ini Latihan Puncak Angkasa Yudha adalah instrumen pertahanan yang digunakan Indonesia untuk menyampaikan pesan kepada China bahwa Natuna adalah wilayah kedaulatan Indonesia yang sah.
- 2) Bentuk efek penggentar/daya tangkal yang diberikan oleh pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha di Lanud Ranai, Kepulauan Natuna adalah sebagai pembangunan kapabilitas militer (*capacity building*) Indonesia di perbatasan dan merupakan suatu simbol kehadiran negara (*state presence*) di perbatasan. Hal ini sesuai dengan teori deterensi non-nuklir yang diajukan Mayor Wee Eng Peow dimana salah satu upaya deterensi bagi negara non-nuklir adalah dengan pembangunan kapabilitas militernya. Hal ini juga dibuktikan dengan penurunan angka pelanggaran wilayah berupa penangkapan ikan secara ilegal oleh China di wilayah perairan Kepulauan Natuna menjadi nol. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa efek deterensi yang dilakukan oleh Indonesia melalui pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha ini berhasil dalam mengurangi praktik pelanggaran wilayah oleh China.

## 5.2 Saran

### 5.2.1 Saran Teoritis

Diadakannya latihan puncak Angkasa Yudha tahun 2016 diharapkan memberikan dampak *deterrence* alias penangkal bagi ancaman di wilayah kedaulatan Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Natuna. Diakibatkan keterbatasan waktu, penelitian ini masih kurang mengkaji bagaimana respons maupun persepsi dari pihak China terhadap latihan Angkasa Yudha tersebut. Akan lebih baik untuk penelitian mendatang melanjutkan penelitian ini di bidang persepsi negara-negara kawasan, terutama negara China terhadap pelaksanaan latihan puncak Angkasa Yudha. Karena untuk mencapai suatu konsep Diplomasi Pertahanan, diperlukan reaksi ataupun respons dari negara lain, sehingga terjadi komunikasi dua arah, dan terjadinya hubungan diplomasi antara satu sama lain.

### 5.2.2 Saran Praktis

1. Peningkatan kemampuan untuk mendeteksi kapal-kapal yang melaksanakan aktivitas pencurian ikan (*IUU Fishing*) di sekitar perairan Kepulauan Natuna, baik dari pihak TNI AU dengan pesawat-pesawat pengintai, TNI AL, Pol Air Bakamla serta KKP dengan kapal-kapal pengawasnya. Karena dengan pemutakhiran kemampuan mendeteksi tentu akan lebih mudah untuk mendeteksi lebih banyak kapal pencuri ikan, mengurangi angka pelanggaran di perairan kita, serta menegakkan kedaulatan wilayah Indonesia di wilayah perairan terutama di perbatasan,
2. Pembangunan sinergi di antara unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan kedaulatan wilayah dalam bentuk penindakan penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia terutama dalam pelaksanaan operasi patrol gabungan antara TNI AU, TNI AL, Bakamla, Polisi Air dan Kementerian Kelautan dan Perikanan,
3. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait perikanan serta penindakan agar penegakan hukum dan penjatuhan saksi dapat

dilakukan dengan lebih tegas dan lebih menimbulkan efek jera (*deterrence*),

4. Meningkatkan kapabilitas militer yang ada di perbatasan sebagai simbol bahwa negara hadir di halaman terdepan negeri (*state presence*) menjadi kunci untuk mempertegas bahwa suatu wilayah menjadi kedaulatan negara kita.
5. Peningkatan pelaksanaan latihan dan patroli gabungan (*joint exercise and patrol*) di wilayah perairan Natuna yang rawan kejahatan transnasional dan lintas batas. Gabungan dari lembaga-lembaga berwenang, seperti *Coast Guard* atau Badan Keamanan Laut (Bakamla), Polisi Air, TNI AL & tentunya TNI AU. Dengan meningkatkan interoperabilitas lembaga-lembaga di atas, penangkapan para pelanggar wilayah dapat ditingkatkan, serta memberikan efek *deterrence* sehingga mereka tidak akan mengulangi kesalahannya.
6. Penegakan dan sosialisasihak negara kepulauan (*archipelagic state*) dalam UNCLOS 1982 yang berdaulat wilayah ZEE-nya hingga 200 mil dari landas kontinen oleh Indonesia untuk menegaskan kedaulatan kita di wilayah perairan Natuna tersebut.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brodie, B. (1959, January). The Anatomy of Deterrence. *World Politics* vol.11, hal. 173-191.
- Cottey, A., & Forster, A. (2010, February 2). Chapter 1: Strategic Engagement: Defence Diplomacy as a Means of Conflict Prevention. *The Adelphi Papers*, 44, 2004(365: Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance), hal. 15-29. doi:<https://doi.org/10.1080/714027947>
- Creswell, J. C. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- McNabb, D. E. (2010). *Research Methods for Political Science*. New York: M.E. Sharpe Inc.
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE.
- Rosencrance, R. (1981). Strategic Deterrence Revisited. (C. Bertram, Penyunt.) *Strategic Deterrence in a Changing Environment - The International Institute for Strategic Studies*, 6.
- Soetrisno, & Hanafie, R. (2007). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

### Berita/Artikel Internet

- BangkaPos.com*. (2016, Mei 30). Diambil kembali dari *BangkaPos.com*: <http://bangka.tribunnews.com/2016/05/30/tni-lagi-nembak-kapal-tiongkok-china-cost-guard-tak-berani-ganggu?page=all>

Christou, J. (2015, April 8). 'Sovereignty' versus 'sovereign rights'. Dipetik March 10, 2019, dari [www.cyprus-mail.com](http://www.cyprus-mail.com): <https://cyprus-mail.com/2015/04/08/sovereignty-versus-sovereign-rights/>

*Kunjungi Natuna Presiden Jokowi Akan Pimpin Rapat Terbatas di Atas KRI Imam Bonjol.* (2016, June 23). Diambil kembali dari Situs Resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <http://setkab.go.id/kunjungi-natuna-presiden-jokowi-akan-pimpin-rapat-terbatas-di-atas-kri-imam-bonjol/>

Kuwado, F. J. (2016, Juni 21). *Jokowi ke Natuna, Gelar Ratas di Kapal Perang Imam Bonjol.* Dipetik Desember 17, 2017, dari [Kompas.com](http://Kompas.com): <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/23/07251731/jokowi.ke.natuna.gelar.ratas.di.kapal.perang.imam.bonjol.>

*Latihan Angkasa Yuda Geser ke Natuna.* (2016, September 26). Diambil kembali dari [Beli](http://Beli): <https://belitongekspres.co.id/latihan-angkasa-yuda-geser-ke-natuna>

*Latihan Tempur Angkasa Yudha 2016 di Kawasan Natuna.* (2016, Oktober 6). Dipetik Januari 10, 2018, dari [PresidenRI.go.id](http://PresidenRI.go.id): <http://presidenri.go.id/berita-aktual/latihan-tempur-angkasa-yudha-2016-di-kawasan-natuna.html>

*Penangkapan Kapal Ikan Asing Ilegal Cina di Natuna 'digagalkan'.* (2016, Maret 20). Dipetik Desember 17, 2017, dari [BBC Indonesia](http://BBC Indonesia): [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/03/160320\\_indonesia\\_kapal\\_cina](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160320_indonesia_kapal_cina)

#### Jurnal/Publikasi Ilmiah

Mazar, M. J. (2018). *Understanding Deterrence*. doi:10.7249/PE295

Mearsheimer, J. J. (1983). *Conventional Deterrence*. Cornell University Press. doi:10.7591/j.ctt1rv61v2

Onwudiwe, I. D., Odo, J., & Onyeozili, E. C. (2005). Deterrence Theory. (M. Bosworth, Penyunt.) *Encyclopedia of Prisons & Correctional Facilities*, hal. 233-237. doi:<http://dx.doi.org/10.4135/9781412952514.n91>

Pedrason, R. (2015). ASEAN's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community? *Dissertation*.

Peow, M. W. (2014, October 2). The Viability of Deterrence Strategies by Non-Nuclear States. (M. H. Cheng, Penyunt.) *Pointer - Journal of the Singapore Armed Forces*, 40, 1-7. Dipetik July 21, 2018, dari [https://www.mindef.gov.sg/oms/content/imindef/publications/pointer/journals/2014/v40n3/\\_jcr\\_content/imindefPars/download/file.res/Binder%20Pointer%20Vol40%20No3.pdf](https://www.mindef.gov.sg/oms/content/imindef/publications/pointer/journals/2014/v40n3/_jcr_content/imindefPars/download/file.res/Binder%20Pointer%20Vol40%20No3.pdf)

Plessis, P. A. (2008). Defence Diplomacy: Conceptual and Practical Dimensions with Specific Reference to South Africa. *Research Articles (University of Pretoria)*, 87-119.  
doi:[https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/10381/DuPlessis\\_Defence%282008%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/10381/DuPlessis_Defence%282008%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Rolfe, J. (2015, January 8). Regional Defence Diplomacy: What Is It and What Are Its Limits? *CSS Strategic Background Paper*, 21, hal. 1-5. Dipetik Desember 18, 2017, dari [https://www.victoria.ac.nz/hppi/centres/strategic-studies/documents/21\\_Defence-Diplomacy-and-Regional-Military-Cooperation.pdf](https://www.victoria.ac.nz/hppi/centres/strategic-studies/documents/21_Defence-Diplomacy-and-Regional-Military-Cooperation.pdf)

#### Dokumen Resmi

*Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa*. (2012).

*Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan*. (t.thn.). Dipetik Desember 17, 2017, dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan: <https://jdih.kkp.go.id/peraturan/uu-2009-45.pdf>

#### Publikasi Lain


Defining Air Power: Part I - Evolution of the Term. (2010, May). *Pathfinder - Air Power Development Centre Bulletin*(133). Dipetik Juli 21, 2018, dari [www.raaf.gov.au/airpower](http://www.raaf.gov.au/airpower)

Wibowo, L. S. (2016, Oktober). Latihan TNI AU Angkasa Yudha '16 Bukan Unjuk Kekuatan Militer. *Majalah Kedirgantaraan Angkatan Udara Suara Angkasa*, hal. 2-7.

Prof Dr Indria Samego: Profesionalisme TNI dengan Reward yang Diberikan oleh Negara. (2016, Oktober). *Majalah Kedirgantaraan Angkatan Udara Suara Angkasa*, hal. 12-17

## LAMPIRAN – 1

### SURAT IZIN PENELITIAN – UNIVERSITAS PERTAHANAN

 <b>KEMENTERIAN PERTAHANAN RI UNIVERSITAS PERTAHANAN</b>	
Nomor : B/ 87 / 11/2019	Bogor, 29 Januari 2019
Klasifikasi : Biasa	
Lampiran : -	
Hal : Permohonan izin penelitian dan permintaan data	Kepada Yth. Kabadiklat Kemhan
	di Jakarta

1. Dasar:

- a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
- b. Kalender Akademik Program Studi Diploması Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2016/2017.

2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:

- a. Sebagai persyaratan kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
- b. Mahasiswa Program Studi Diploması Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan atas nama Wida Sanditya Kusuma NIM: 120160106032, bermaksud menyusun tesis dengan judul: Diploması Pertahanan Indonesia terhadap Pelanggaran Wilayah oleh China di Perairan Kepulauan Natuna melalui Pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU tahun 2016.

3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon mahasiswa dimaksud diizinkan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara.

4. Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Wida Sanditya Kusuma, nomor HP. +6285217948581, e-mail : [widasandityakusuma@gmail.com](mailto:widasandityakusuma@gmail.com)

5. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor  
Universitas Pertahanan  
Wakil Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,  
  
Sudibyo, S.E., D.S.S., M.Si  
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Menteri KKP
2. Rektor Unhan
3. Asren Kasau
4. Asren Kasal



5. Asops Kasau
6. Asren Kasal
7. Pangkohanudnas
8. Pankoarmabar I
9. Dekan FSP Unhan
10. Kepala Operasi Angkasa Yudha 2018
11. Asdep Hukum dan Perjanjian Maritim
12. Asdep Keamanan dan Ketahanan Maritim
13. Asdep Delimitasi Zona Maritim
14. Karo Aka. dan Kemahasiswaan Unhan
15. Satgas 115 KKP
16. Ses Prodi Diplomasi Pertahanan FSP Unhan.

Lampiran Surat Rektor Unhan  
Nomor : B/ 87 /1/2019  
Tanggal : 29 Januari 2019


**DAFTAR NAMA PEJABAT:**

1. Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
2. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
3. Perwakilan Bidang Politik, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia
4. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Professor Hasjim Djalal
8. Professor Leo Suryadinata
9. Peneliti *Central for Strategic and International Studies* (CSIS)
10. Peneliti *The Habibie Center* (THC)

a.n. Rektor  
Universitas Pertahanan  
Wakil Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,  
  
Sudibyo, S.E., D.S.S.,M.Si  
Mayor Jenderal TNI



## SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN – KEMENTERIAN KELAUTAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN**  
**SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 GEDUNG MINA BAHARI IV LANTAI 11 JAKARTA 10110  
 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON : (021) 3514728 (HUNTING) FAKSIMILE : (021) 3520346  
 WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

---

Jakarta, 13 Februari 2019

Nomor : 0958/PSDKP.0.2-3/DL.137/11/2019  
 Hal : Permohonan Penelitian


Yth: Rektor Universitas Pertahanan

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: B/87/11/2019 tanggal 29 Januari 2019, hal Surat Permohonan Penelitian dan permintaan data, bersama ini disampaikan bahwa permohonan Saudara untuk izin penelitian mahasiswa atas nama *Wida Sanditya Kusuma* dengan NIM : 120160106032 dalam rangka penulisan tesis dengan judul "Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Pelanggaran Wilayah oleh China di Perairan Kepulauan Natuna melalui Pelaksanaan latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU Tahun 2016" pada Direktorat Jenderal PSDKP pada prinsipnya **dapat disetujui**.

Sebagai tindak lanjut untuk pelaksanaan penelitian dimaksud, mahasiswa yang bersangkutan dapat memulai melakukan penelitian pada Sub bagian Kerja sama dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP, Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Gedung Mina Bahari IV lantai 10 pada tanggal 15 Februari 2019.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Ditjen PSDKP



Waluyo S. Abutohir, SH, MM

Tembusan :

1. Plt. Direktur Jenderal PSDKP;
2. Plt. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas.

**DAN PERIKANAN**

## LAMPIRAN 2

### PEDOMAN WAWANCARA – 1

#### Kementerian Kelautan dan Perikanan

No.	Daftar Pertanyaan
1.	<p>Apa saja langkah-langkah preventif yang pernah diambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengurangi angka penangkapan ikan secara ilegal, terutama di wilayah perairan Natuna (difokuskan pada periode sebelum tahun 2016 dan setelah tahun 2016)?</p>
2.	<p>Apakah di dalam merumuskan langkah-langkah preventif atau protektif untuk mencegah angka penangkapan ikan secara ilegal, KKP berkordinasi dengan pihak lain seperti Bakamla, TNI AL dan TNI AU?</p> <p><i>(Baru-baru ini KKP menandatangani Nota Kesepahaman/MoU untuk penguatan kerjasama KKP-TNI di bidang ketahanan pangan dan pengamanan sector kelautan melindungi perairan Indonesia, dalam hal apa saja?)</i></p>
3.	<p>Apakah Kementerian Kelautan dan Perikanan memandang pelaksanaan Latihan Operasi Puncak Angkasa Yudha tahun 2016 oleh TNI AU sebagai salah satu upaya penangkalan untuk membuat para pelanggar/penangkap ikan ilegal di perairan Natuna jera (memberikan efek penangkalan/<i>deterrence effect</i>)?</p>
4.	<p>Apakah setelah pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha tahun 2016 di Natuna terdapat penurunan angka pelanggaran berupa penangkapan ikan ilegal/IUUF oleh negara asing (terutama oleh China) di sekitar wilayah perairan Natuna? (Grafik</p>

	data pelanggaran berupa penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Natuna)
--	---

## **PEDOMAN WAWANCARA – 2**

### **Kementerian Pertahanan**

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Bagaimana menurut instansi Kemhan tentang ancaman kedaulatan yang terjadi di Perairan Natuna oleh China (baik tentang pelanggaran pencurian SDM berupa pencurian ikan secara illegal/IUUF, maupun pelanggaran kedaulatan berupa klaim ZEE Kepulauan Natuna dalam 9 dash lines) dan langkah preventif apa yang telah dilaksanakan oleh Kemhan terkait pelanggaran tersebut?
2.	Apakah menurut Kemhan pemindahan pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha yang semua akan dilaksanakan di Bangka Belitung, dan kemudian dipindahkan ke Kepulauan Natuna adalah suatu langkah deterrence (penangkalan) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh China? Jika iya/tidak, mengapa?
3.	Apakah menurut Kemhan pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha tersebut merupakan suatu upaya Diplomasi Pertahanan yang dilakukan Indonesia terhadap negara China? Jika iya, elemen apakah yang ditekankan dalam pelaksanaan Latihan tersebut?
4.	Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), terdapat pengurangan angka pelanggaran pencurian ikan ilegal oleh China di wilayah Perairan Natuna pasca diadakannya

	Latihan Puncak Angkasa Yudha. Apakah hal ini berarti efek penangkalan ( <i>deterrence</i> ) dari Latihan Puncak Angkasa Yudha berhasil?
5.	Apakah dengan diadakannya Latihan Puncak Angkasa Yudha berpengaruh terhadap hubungan strategis antara China dan Indonesia (dalam hal ini, kerjasama bidang Pertahanan)?

### PEDOMAN WAWANCARA – 3

#### Markas Besar (MaBes) TNI AU – Bidang Operasi

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Apakah <b>tujuan</b> dilaksanakannya Latihan Puncak Angkasa Yudha TNI AU secara umum? Dan apakah <b>konsep</b> utama yang ditekankan pada pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha pada tahun 2016 yang lalu?
2.	Apakah <b>alasan utama dipindahkannya</b> pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha dari Bangka Belitung ke Kepulauan Natuna pada tahun 2016 lalu? Apakah pemindahan tersebut memiliki tujuan untuk penangkalan/efek gentar ( <i>deterrence effect</i> ) terhadap tindakan pelanggaran wilayah (penangkapan ikan secara illegal/IUUF dan klaim ZEE Natuna) oleh China di perairan Natuna?
3.	Bagaimana menurut TNI Angkatan Udara tentang pendapat para ahli Hubungan Internasional yang berpendapat bahwa Latihan Puncak Angkasa Yudha adalah <b>salah satu bentuk diplomasi pertahanan</b> dan dapat memberikan efek gentar ( <i>deterrence effect</i> ) bagi pelanggaran wilayah di perairan Natuna?

4.	Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), terdapat <b>pengurangan angka pelanggaran</b> pencurian ikan illegal oleh China di wilayah Perairan Natuna pasca diadakannya Latihan Puncak Angkasa Yudha. Apakah hal ini berarti efek penangkalan ( <i>deterrence</i> ) dari Latihan Puncak Angkasa Yudha berhasil?
5.	Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki <b>kerjasama</b> dengan TNI Angkatan Udara di bidang pengamanan dan pengawasan sumber daya kelautan, terutama di bidang <b>air surveillance</b> . Dapatkah bapak/ibu menjelaskan lebih lanjut terkait hal ini?
6.	Baru-baru ini, Menteri Susi Pudjiastuti dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menandatangani <b>nota kesepahaman (MoU)</b> terkait kerjasama yang baru dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Mabes TNI dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pengamanan sektor kelautan dan perikanan, terutama dalam upaya memberantas penangkapan ikan illegal (IUU Fishing). Dapatkah bapak/ibu menjelaskan lebih lanjut terkait hal ini? Apa saja <b>peran TNI AU</b> di dalam kerjasama ini?
7.	Bagaimana pendapat anda tentang <b>persepsi dari China</b> (perwakilan kedutaan maupun media) terhadap pelaksanaan Latihan Puncak Angkasa Yudha tahun 2016 tersebut?
8.	Apakah dengan diadakannya Latihan Puncak Angkasa Yudha

	tahun 2016 berpengaruh terhadap <b>hubungan strategis</b> antara China dan Indonesia terutama dalam kerjasama bidang pertahanan?
--	--

## LAMPIRAN 3

### DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar Lampiran 1:

Wawancara dengan Bapak Sahono Budianto, S.St.Pi., M.Si, Kepala Sub-Bagian Kerjasama dan Humas, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Kelautan & Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan & Perikanan.

Lokasi: Gedung Mina Bahari IV lantai 10, Kementerian Kelautan & Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur

Jakarta, 14 Februari 2019

Gambar Lampiran 2:

Wawancara dengan Bapak Kolonel Oktaheroe Rasmi, Kepala Direktorat Kerjasama Internasional, Direktorat Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan

Lokasi: Gedung Ahmad Yani lantai 2, Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat

Jakarta, 18 Februari 2019



## LAMPIRAN – 3

### DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar Lampiran 3 & 4:

Wawancara dengan Bapak Letnan Kolonel Nav Sonni Benny Simanjuntak, M.Si.Han, Pabandya Renlat Paban III/Lat Sops AU

Lokasi: Gedung Roesmin Nurjadin, lantai 5, Mabes TNI AU, Komplek TNI Cilangkap

Cilangkap, 25 Februari 2019

